KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

InTress

LAPORAN KINERJA 2022

KPPN SANGGAU

KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja *(performance based budgeting)* secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bagian dari unit pemerintahan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2022 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan program/kegiatan oleh berbagai jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di samping itu, melalui Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Sanggau sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

LAKIN KPPN Sanggau Tahun 2022 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN KPPN Sanggau Tahun 2022 ini diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh pegawai KPPN Sanggau untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Sanggau, 24 Januari 2022
Kepala KPPN Sanggau

Agustinus Prasetyo
NIP 197008261992011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
C. PERAN STRATEGIS
D. SISTEMATIKA LAPORAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, wajib menyusun laporan kinerja.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara didaerah dalam melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban APBN, penatausahaan penerimaan Negara, serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPPN Sanggau mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kapupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN KPPN Sanggau Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPPN Sanggau dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPPN Sanggau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di KPPN Sanggau, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Ditjen Perbendaharaan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka tugas KPPN Sanggau adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas tersebut di atas, KPPN Sanggau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*treasury management representative*);.
12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan system akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19. Pelaksanaan Kehumasan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
20. Pelaksanaan administrasi KPPN

Struktur Organisasi KPPN Sanggau

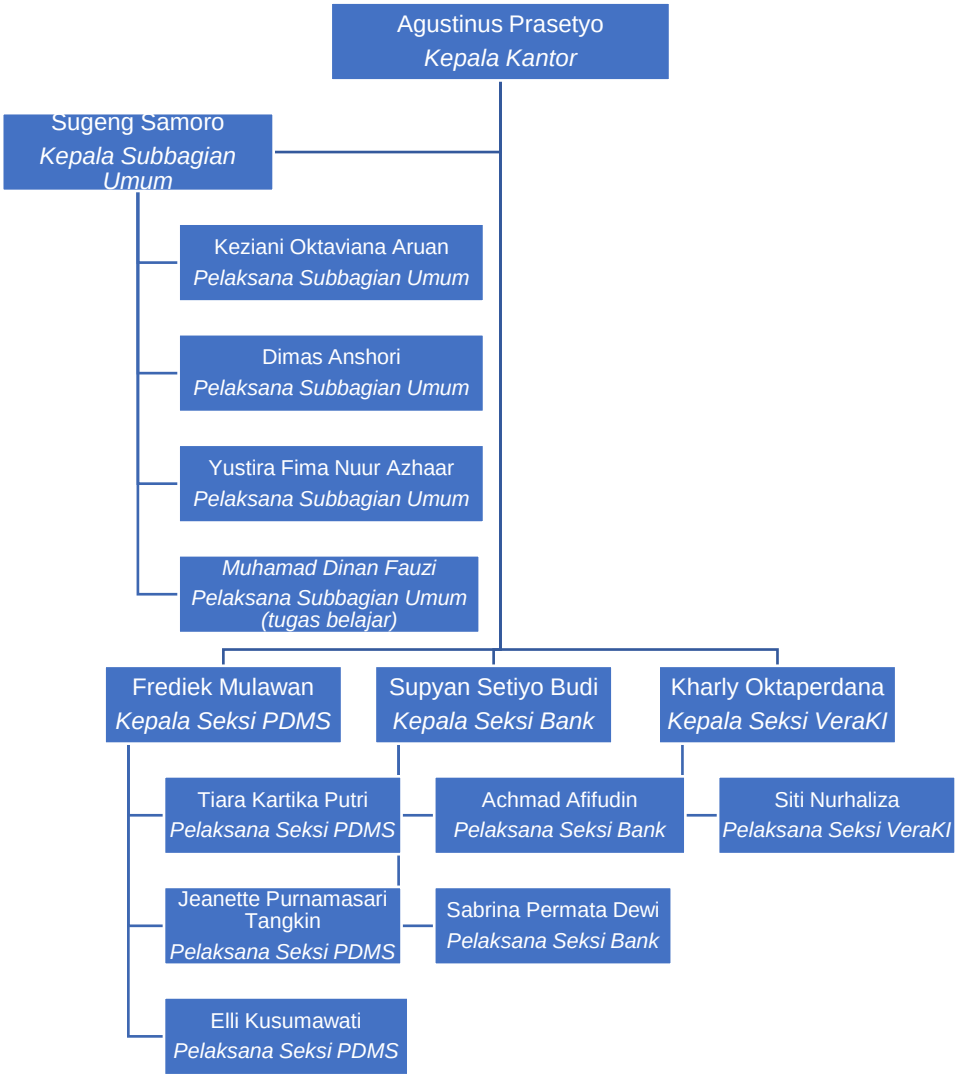

Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) memadai tidak akan membawa ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Pengelolaan SDM ditujukan kepada terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas, profesionalitas dan kesejahteraan. SDM KPPN Sanggau per 31 Desember 2022 adalah sejumlah 15 orang dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia KPPN Sanggau

TABEL 1.1
SDM KPPN Sanggau per 31 Desember 2022

GENDER			USIA			PENDIDIKAN		
Pria	:	7	20 s.d. 29	:	10	Strata III / Doktoral	:	0
Wanita	:	8	30 s.d. 39	:	1	Strata II / Magister	:	2
			40 s.d. 49	:	3	Diploma IV (Keu.)	:	1
			50 s.d. 59	:	1	Strata I / Sarjana	:	2
						Diploma III	:	4
						Diploma I (Keu.)	:	6
						SMA	:	1
						SMP	:	0
						SD	:	0

C. PERAN STRATEGIS

Sebagai sebuah organisasi yang dapat dikategorikan sebagai sebuah *holding type organization* karena memiliki kantor vertikal cukup banyak, ditambah dengan jumlah pegawai ribuan orang, serta memberikan pelayanan langsung kepada *stakeholders*, Ditjen Perbendaharaan memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran strategis KPPN Sanggau terkait dengan pelayanan publik antara lain:

1. Terciptanya pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN sesuai ketentuan;
2. Tersalurnya dana APBN sesuai ketentuan;
3. Terciptanya tertib adminsitrasi pengelolaan dan pemanfaatan BMN;
4. Terwujudnya penatausahaan PNBP;
5. Terbukukannya seluruh penerimaan dan pengeluaran APBN;
6. Terciptanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBN;
7. Terwujudnya informasi dan pelaporan perbendaharaan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah;
8. Terciptanya pengelolaan administrasi keuangan secara efisien dan efektif;
9. Tersedianya SDM yang berkualitas;
10. Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas pokok.

Seluruh fungsi di internal KPPN Sanggau saling bersinergi dan terintegrasi penuh, baik antar seksi maupun subbag umum. Sebagai suatu organisasi terbuka, KPPN Sanggau berinteraksi dan menyelaraskan diri dengan lingkungan eksternal, seperti teknologi, ekonomi, undang-undang, dan faktor sosial kemasyarakatan, serta selalu berusaha menggunakan teknologi yang tepat guna dan menjadi organisasi pembelajar yang menuntut seluruh elemen di dalamnya untuk selalu mengembangkan diri sesuai kerangka budaya organisasi yaitu profesional, disiplin, akuntabel, pelayanan prima, dan inovatif. Segenap elemen senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, memiliki *role model* dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui keteladanan para pimpinan organisasi, pandangan dan harapan pimpinan terhadap organisasi ke depan.

Dengan dukungan pimpinan terkait manajerial organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, fungsi-fungsi *treasury* akan berkembang untuk mengikuti tuntutan *stakeholders*. Konsep keterpaduan telah diperluas dari sekedar untuk kepentingan salah satu fungsi secara sempit, menjadi lebih komprehensif dan menyentuh fungsi-fungsi lain di dalam organisasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas-tugas keseharian yang sebelumnya dilaksanakan secara manual dan mampu meningkatkan peran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi dalam menciptakan kondisi fiskal negara yang sehat dan berkesinambungan.

Adapun isu strategis yang dihadapi KPPN Sanggau pada tahun 2022 antara lain:

1. KPPN Sanggau melakukan sosialisasi dan pemantauan IKPA khususnya pada indikator capaian output melalui Aplikasi OM SPAN, melakukan pembahasan dan reviu capaian IKPA secara triwulanan;
2. KPPN Sanggau melaksanakan sosialisasi aturan dan implementasi pelaksanaan kartu kredit pemerintah serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan tersebut;
3. KPPN Sanggau melaksanakan sosialisasi aturan dan implementasi pelaksanaan digitalisasi pembayaran (Digipay) pada satuan kerja;
4. KPPN Sanggau melakukan *refreshment* PPK/PPSPM dan meningkatkan implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan;
5. KPPN Sanggau melaksanakan monitoring dan evaluasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada debitur secara *on the spot* dan melaporkannya secara semesteran.
6. KPPN Sanggau melaksanakan transfer ke daerah berupa Dana Desa, DAK Fisik dan DAK Non Fisik kepada Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau.

KPPN Sanggau telah melaksanakan pelatihan aplikasi serta internalisasi mengenai aturan dan *current issue* terbaru bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPPN Sanggau Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

   Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja

   Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
   a. Capaian Kinerja Organisasi

      Subbab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
   b. Realisasi Anggaran

      Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
   c. Kinerja Lain-Lain

      Subbab ini berisi informasi capaian kinerja lainnya (bukan kinerja utama yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2022).
4. Bab IV Penutup

   Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran

   Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja) Tahun 2022, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Matriks Cascading Tahun 2022, dan Rincian Kerta Kerja Revisi Terakhir Tahun 2022.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2022 KPPN Sanggau telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja baik di tingkat pusat maupun kantor vertikal di daerah. Seluruh kegiatan tersebut tingkat capaian kinerjanya telah memenuhi sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun 2022 telah ditunjukkan kinerja yang membanggakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Sanggau. Pencapaian kinerja KPPN Sanggau pada tahun 2022 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

No.	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	89	95,36	107,15%
2.	Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95	99,96	105,22%
3.	Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN	4,65	4,94	100,60%
4.	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40	99,83	100,44%
5.	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	100%	100%	100%
6.	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90%	96,10%	106,78%
7.	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,50	97,28	109,92%
8.	Persentase akurasi perencanaan kas	83	100	120%
9.	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15	4,00	120%
10.	Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99,34	110,38%
11.	Indeks Implementasi Digipay	3,00	3,80	120%
12.	Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker	90	100	111,11%
13.	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25	4,00	120,00%
14.	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5	100	101,52%
15.	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84,5	92,66	109,66%
16.	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85	94,60	111,29%
17.	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	96,80	120%
18.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,50%	99,68%	104,38%
19.	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83	91,34	110,05%
20.	Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	166,07	120%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GRAFIK vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 2

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2

C. Peran Strategis 4

D. Sistematika Laporan 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

A. Rencana Strategis 8

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

A. Capaian Kinerja Organisasi 15

B. Realisasi Anggaran 65

C. Kinerja Lainnya 68

BAB IV PENUTUP 74

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja) Tahun 2022
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
- Matriks Cascading Tahun 2022
- Rincian Kertas Kerja Revisi Terakhir KPPN Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 SDM KPPN Sanggau per 31 Desember 2022 4

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau 11

Tabel 2.2 Pendanaan Per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 13

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif 15

Tabel 3.2 Capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022 17

Tabel 3.3 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel 19

Tabel 3.4 Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L tahun 2022 19

Tabel 3.5 Perkembangan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L tahun 2018-2022 20

Tabel 3.6 Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang Berkualitas tahun 2022 22

Tabel 3.7 Perkembangan Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang Berkualitas tahun 2018-2022 23

Tabel 3.8 Capaian Iku pada Sasaran Strategis, Birokrasi, dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien 25

Tabel 3.9 Capaian IKU Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN tahun 2022 26

Tabel 3.10 Perkembangan Indeks Kepuasa Satker terhadap Layanan KPPN tahun 2018-2022 26

Tabel 3.11 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Perumusan Regulasi dan Otorisasi yang Kredibel 28

Tabel 3.12 Capaian IKU persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu tahun 2022 29

Tabel 3.13 Perkembangan presentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu tahun 2018-2022 29

Tabel 3.14 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi yang berkesinambungan 31

Tabel 3.15 Capaian IKU Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI tahun 2022 33

Tabel 3.16 Perkembangan Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI tahun 2018-2022 33

Tabel 3.17 Capaian IKU Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi peabat perbendaharaan tahun 2022 35

Tabel 3.18 Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikais tahun 2022 37

Tabel 3.19 Perkembangan Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi tahun 2018-2022 37

Tabel 3.20 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kas yang Optimal 39

Tabel 3.21 Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas tahun 2022 40

Tabel 3.22 Perkembangan Persentase Akurasi Perencanaan Kas tahun 2018-2022 40

Tabel 3.23 Capaian IKU Indeks Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas tahun 2022 43

Tabel 3.24 Perkembangan indeks Efektivitas Pengelolaan pengeluaran Kas tahun 2018-2022 43

Tabel 3.25 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien 44

Tabel 3.26 Capaian IKU Nilai kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 45

Tabel 3.27 Perkembangan Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018-2022 46
Tabel 3.28 Capaian IKU Indeks Implementasi Digipay tahun 2022 48
Tabel 3.29 Capaian IKU tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output satker tahun 2022 50
Tabel 3.30 tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output satker tahun 2018-2022 50
Tabel 3.31 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu 52
Tabel 3.32 Capaian IKU Persentase Rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan Andal tahun 2022 53
Tabel 3.33 Capaian IKU Persentase LPJ Bendahara yang Andal dan Tepat Waktu tahun 2022 55
Tabel 3.34 Perkembangan Persentase LPJ Bendahara yang Andal dan Tepat Waktu tahun 2018-2022 55
Tabel 3.35 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi 57
Tabel 3.36 Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Tahun 2022 57
Tabel 3.37 Perkembangan Nilai Kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Tahun 2018-2022 58
Tabel 3.38 Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2022 59
Tabel 3.39 Perkembangan Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2018-2022 60
Tabel 3.40 Capaian IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai tahun 2022 62
Tabel 3.41 Perkembangan Nilai rata-rata hard competency pegawai tahun 2018-2022 62
Tabel 3.42 Capaian IKU pada Sasara Strategis Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efektif, efisiem, dan akuntabel 63
Tabel 3.43 Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN tahun 2022 64
Tabel 3.44 Perkembangan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN tahun 2018-2022 64
Tabel 3.45 Capaian IKU Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB Tahun 2022 66
Tabel 3.46 Perkembangan Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB Tahun 2018-2022 67
Tabel 3.47 Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan BMN Tahun 2022 68
Tabel 3.48 Perkembangan tingkat kualitas perbembangan BMN tahun 2018-2022 69
Tabel 3.49 Capaian IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Tahun 2021 64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 NKO KPPN Sanggau Tahun 2018-2022 17

Grafik 3.2 Perkembangan Nilai LK Kinerja Pelaksanaan Anggarna K/L tahun 2018-2022 20

Grafik 3.3 Perkembangan Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas tahun 2018-2022 23

Grafik 3.4 Perkembangan Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN tahun 2018-2022 26

Grafik 3.5 Perkembangan Persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu tahun 2018-2022 30

Grafik 3.6 Perkembangan Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2018-2022 33

Grafik 3.7 Perkembangan Indeks Efektivitas, Edukasi dan Komunikasi tahun 2018-2022 38

Grafik 3.8 Perkembangan Persentase Akurasi Pencanaan Kas tahun 2018-2022 41

Grafik 3.9 Perkembangan Indeks Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas tahun 2020 -2022 43

Grafik 3.10 Perkembangan Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018-2022 46

Grafik 3.11 Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output tahun 2021-2022 51

Grafik 3.12 Perkembangan Persentase LPJ Bendahara yang Andal dan Tepat Waktu tahun 2018-2022 55

Grafik 3.13 Perkembangan Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Tahun 2018-2022 58

Grafik 3.14 Perkembangan Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2019-2022 60

Grafik 3.15 Perkembangan Nilai rata-rata hard competency pegawai Tahun 2018-2022 62

Grafik 3.16 Perkembangan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2018-2022 65

Grafik 3.17 Perkembangan Tingkat kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB Tahun 2018-2022 67

Grafik 3.18 Perkembangan Tingkat kualitas pengelolaan BMN Tahun 2018-2022 69

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

KPPN Sanggau melaksanakan Rencana Strategis DJPb 2020-2024, dimana renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategi dan *milestone* DJPb dan *Roadmap* Organisasi DJPb. Strategi organisasi disusun oleh seluruh SDM KPPN Sanggau untuk menghadapi tantangan dalam pencapaian visi dan misi. Untuk lebih mempertajam dan memberikan pemahaman setiap pegawai untuk pencapaian tujuan organisasi ditetapkan pula rencana kerja tahunan yang memuat rencana aksi dalam melaksanakan fungsi *treasury*. Dengan dukungan SDM yang profesional dan anggaran yang memadai mampu memberikan layanan terbaik dalam peningkatan kualitas layanan publik. KPPN Sanggau telah menetapkan visi, yaitu:

Visi dan Misi KPPN Sanggau

"Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia"

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPPN Sanggau menjalankan Misi Ditjen Perbendaharaan yang meliputi:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modem,efektif, dan adaptif.

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja tahun 2022 merupakan Kontrak Kinerja Kepala KPPN Sanggau sebagai Pemilik Peta Strategi, dijabarkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Peta Strategi KPPN Sanggau tahun 2022 tersebut dapat ditunjukkan pada gambar berikut.

Peta Strategi KPPN Sanggau Tahun 2022

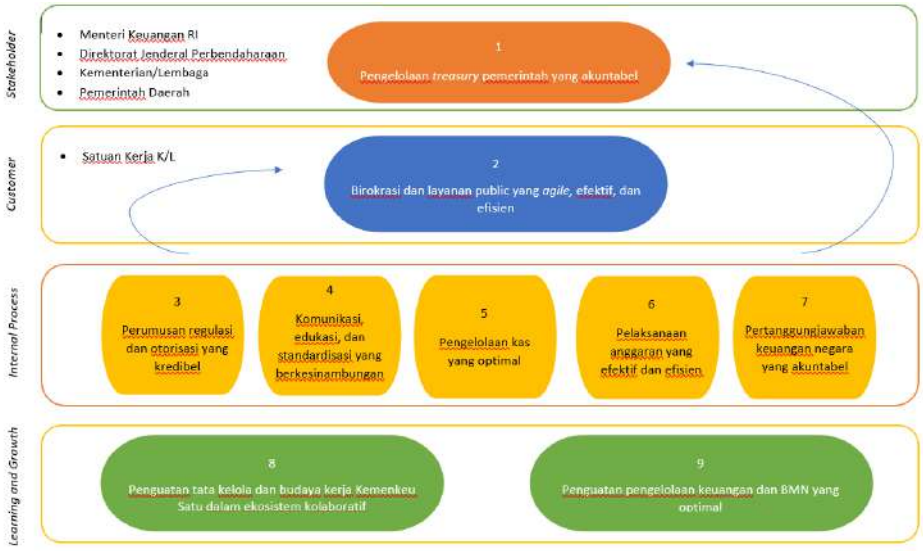

Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. ***Stakeholders Perspective***

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. ***Customer Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. ***Internal Process Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. ***Learning and Growth Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

9 (sembilan) sasaran strategis yang telah ditetapkan pada setiap perspektif untuk tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholders perspecitve* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:
   - **Pengelola *treasury* pemerintah yang akuntabel**

     Pengelolaan perbendaharaan artinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab.
2. *Customer perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:
   - **Birokrasi dan layanan publik yang *agile,* efektif, dan efisien**

     Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanaan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminsitratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang *agile*, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.
3. *Internal process perspective* terdiri atas 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:
   a. **Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel**

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh Kanwil DJPb dalam rangka pengelolaan perbendaharaan. Optimal adalah sesuai dengan kebutuhan, implementatif, dan tidak saling bertentangan. Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan.

b. Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan edukasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

c. Pengelolaan kas yang optimal

Pengelolaan kas yang optimal artinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat memanfaatkan kas yang ada sesuai dengan kebutuhan, memanfaatkan *idle cash* dengan hasil yang maksimal, meminimalisir *cost* dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, dimana manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan pruden dan optimal dalam pengelolaan kas negara berarti kemampuan dalam mengelola kas negara dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

d. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Dalam rangka memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapaia output yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para stakeholder. Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

e. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

4. *Learning and growth perspective* terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

a. Penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Setiap eselon 1 di Kementerian Keuangan memiliki perannya masing masing dalam mengatur keuangan negara. Penting adanya sinergi antar eselon 1 di Kementerian Keuangan. Dalam rangka meningkatkan sinergi dan keharmonisan dalam keluarga Kementerian Keuangan, maka perlu dilakukan penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu.

b. Pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisein dan akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Barang Milik Negara yang dimiliki oleh suatu unit. Optimal adalah pengelolaan keuangan dan BMN dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut dirumuskan kedalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan dan ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-CP	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	89
		1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95
2.	Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100
		4b-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90%

		4c-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	83%
		5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (skala 4)
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		6b-CP	Indeks Implementasi Digipay	3
		6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	7a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25
		7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%
8.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	84,5
		8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85
		8c-N	Nilai rata–rata *hard competency* pegawai	78
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83
		9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2022, dalam upaya mencapai 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut, KPPN Sanggau didukung anggaran yang dibagi ke dalam 2 (kegiatan) kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
Pendanaan Per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Resiko	Rp. **54.556.000**
2.	Dukungan Manajemen	Rp. **1.383.166.000**
	Jumlah	**Rp. 1.437.722.000**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
B. REALISASI ANGGARAN
C. KINERJA LAINNYA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPPN Sanggau tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengkuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Sanggau adalah sebesar 108,93**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

PERSPECTIVE	**BOBOT**	**REALISASI**	**NILAI**
STAKEHOLDER	30%	106,19%	31,86
CUSTOMER	20%	106,24%	21,25
INTERNAL PROCESS	25%	110,25%	27,56
LEARNING AND GROWTH	25%	113,02%	28,26
NILAI KINERJA ORGANISASI			**108,93**

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Perspektif

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, realisasi seluruh perspektif mendapat nilai di atas 100% dengan nilai tertinggi terdapat pada *Stakeholder Perspective.* Kinerja KPPN Sanggau tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat ditunjukkan pada Grafik 3.1.

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Sanggau Tahun 2022

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.1, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, NKO KPPN Sanggau mendapatkan nilai pada tahun 2018 sebesar 106,81, kemudian turun menjadi 106,27 pada tahun 2019 dan kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 108,11, dan meningkat lagi menjadi 108,66 pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 menjadi 108,93.

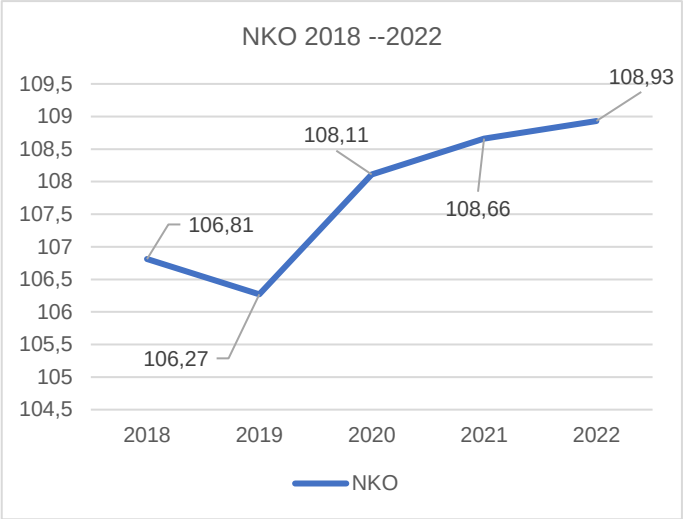

GRAFIK 3.1
NKO KPPN Sanggau Tahun 2018—2022

Capaian IKU KPPN Sanggau Tahun 2022

Data capaian 20 IKU dapat ditunjukkan pada Tabel 3.2.

TABEL 3.2
Capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
Stakeholder Perspective (30%)				31,86
1	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel			106,19
1a-CP	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	89	95.36	107,15
1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95	99,96	105,22
Customer Perspective (15%)				21,25
2	Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien			106,24
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65	4,94	106,24
Internal Process Perspective (25%)				27,56
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel			100,44
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99,83%	100,44
4	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan			105,56
4a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100%	100,00
4b-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90%	96,10%	106,78
4c-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,50	97,28	109,92
5	Pengelolaan kas yang optimal			120
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	83%	100%	120
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15	4,00	120
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien			114,50
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99,34	110,38
6b-CP	Indeks Implementasi Digipay	3	3,8	120,00

6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90	100	111,11
7	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel			170,76
7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	3,25	4	120,00
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%	100%	101,52
Learn and Growth Perspective (25%)				28,26
8	Penguatan tata Kelola dab budaya kerja kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif			113,64
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	84,5	92,66	109,66
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85	94,6	111,29
8c-N	Nilai rata-rata *hard competency* pegawai	78	96,80	120
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel			112,39
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,50%	99,68%	104,38
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83	91,34	110,05
9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaarn	100%	166,07%	120
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				**108,93**

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, realisasi seluruh IKU KPPN Sanggau (20 IKU) telah mencapai target yang telah ditentukan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis

Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel

Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan juga untuk mendukung pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencukupi kebutuhan kas dalam pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengelolaan perbendaharaan juga diharapkan dilakukan secara produktif, yaitu dapat menjadi nilai tambah dalam membangun pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara Indonesia. Namun demikian, pengelolaan perbendaharaan dan risiko tersebut harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efektif, dan efisien.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Sanggau mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.3.

TABEL 3.3
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel

SS 1: Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-CP	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	89	95,36	107,15
1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95	99,96	105,22

16a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi

Setiap aspek memiliki beberapa variabel yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan satker K/L. Jumlah dan rincian variabel untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Cara ukur / formula

Hasil penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN
Metode penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut:
IKPA =∑ (Bobot x Nilai Variabel) x 100
Keterangan:

1. IKPA adalah Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L.
2. Tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan.

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 89 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022. Target tersebut sama dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 89.

Realisasi tahun 2022

Nilai kinerja pelaksanaan K/L tahun 2022 yaitu sebesar 95,36.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Hasil penilaian IKPA pada Aplikasi OM SPAN.

TABEL 3.4
Capaian IKU Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L Tahun 2022

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	89	89	89	89	89	89	89	*Maximize/ Average*
Realisasi	98,74	94,61	95,68	95,04	95,04	95,06	95,36	
Indeks Capaian	108,70%	106,30%	107,51%	106,78%	106,78%	106,80%	107,03 %	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 95,36 tersebut melampaui target IKU sebesar 89 dengan indeks capaian 107,03%.

Perkembangan Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.5 dan Grafik 3.2.

TABEL 3.5
Perkembangan Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L Tahun 2018 - 2022

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2022
Target	80	88	88	89	89
Realisasi	92,98	93,78	98,61	98,43	95,36
Nilai	**116,23%**	**106,57%**	**112,06%**	**110,60%**	**107,15%**

GRAFIK 3.2
Perkembangan Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L Tahun 2018 – 2022

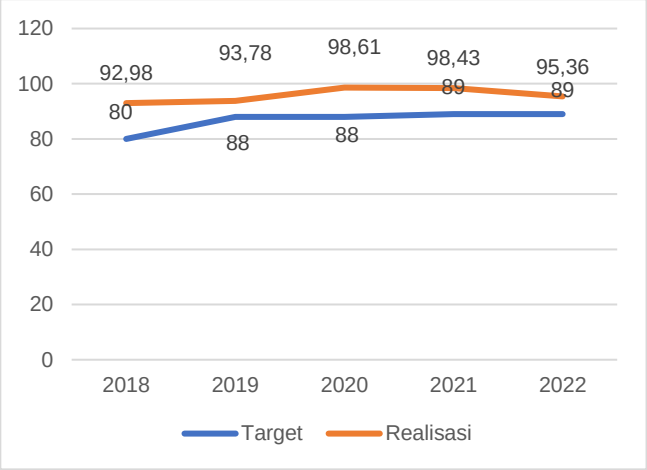

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.25 dan Grafik 3.9, Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L meningkat pada tahun 2018 hingga 2020 dan kembali menurun pada tahun 2021 hingga 2022. Pencapaian nilai tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 dengan capaian 98,61.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat pokok-pokok reformulasi IKPA tahun 2022 yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan anggaran serta penyesuaian bobot 8 indikator dalam IKPA.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyampaikan Surat Nomor S-88/KPN.1703/2022 tanggal 2 Februari 2022 hal Percepatan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2022 pada Satker Lingkup KPPN Sanggau.
2. Menyampaikan Surat Nomor S-439/KPN.1703/2022 tanggal 30 November 2022 hal Percepatan Pengajuan SPM pada bulan Desember 2022.
3. Melakukan *One on One Meeting* dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan seluruh satker.
4. Melakukan monitoring secara bulanan terhadap nilai capaian setiap variabel bagi seluruh satker.
5. Melakukan monitoring secara manual terhadap indikator yang mempunyai bobot tinggi antara lain data kontrak, pengelolaan UP, LPJ, renkas, Konfirmasi Capaian Output dan penyelesaian tagihan.
6. Melakukan pembinaan dan konsultasi kepada satker baik melalui SMS/WA maupun melalui video conference Aplikasi Zoom.

Analisis penyebab

1. Penguatan Monev Kinerja Capaian Output fokus pada Pencapaian Progres dan Output Riil.
2. Penyelarasan Realisasi Belanja dengan Perencanaan dan Output yang dicapai
3. Peningkatan Realisasi per Jenis Belanja sesuai target dalam IKPA 2022

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi IKU berikut adalah sebesar Rp 26.428.000. Realisasi anggaran melebihi 90% dengan capaian output melebihi target yang ditentukan. Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Rencana aksi masa depan

1. Meningkatkan realisasi dengan disiplin berdasarkan jenis belanja dan melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun.
2. Melaksanakan monitoring secara bulanan terhadap nilai capaian setiap variabel bagi seluruh satuan kerja.
3. Mengingatkan satuan kerja untuk selalu *aware* dan memonitor nilai IKPA melalui aplikasi OMSPAN.

1a-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU. KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan

dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil. LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Cara ukur / formula

Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Daerah adalah sebagai berikut:

Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 80-94 (Baik)

Level 2 = 65-79 (Cukup)

Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2022, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat UAKBUN-D KPPN tahun 2021.

Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 95 sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau tahun 2022. Target tersebut lebih tinggi daripada target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 94.

Realisasi tahun 2022

Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2022 yang dilakukan oleh Kanwil DJPb yaitu sebesar 99,96.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Nilai diperoleh dari hasil penilaian Kanwil DJPb sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Nomor KEP-132/WPB.17/2022.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.6
Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	95	95	Maximize / *Take Last Known Value*
Realisasi	-	-	-	-	-	99,96	99,96	
Indeks Capaian	-	-	-	-	-	105,22%	105,22%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.6, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2022) sebesar 99,96 tersebut melampaui target IKU sebesar 95 dengan indeks capaian 105,22%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan

Perkembangan Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.7 dan Grafik 3.2.

beberapa tahun terakhir

TABEL 3.7
Perkembangan Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2018 - 2022

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2022
Target	93	94	94	94	95
Realisasi	97,15	98,22	99,98	99,90	99,96
Nilai	**104,46%**	**104,49%**	**106,36%**	**106,25%**	**105,22%**

GRAFIK 3.3
Perkembangan Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2018 - 2022

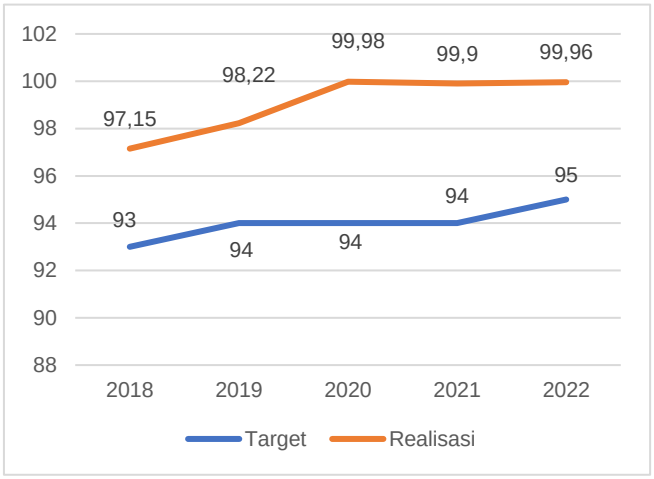

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8 dan Grafik 3.10, Nilai LK Kuasa BUN KPPN Sanggau terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan menurun pada tahun 2021 dan Kembali meningkat di tahun 2022. Pencapaian nilai tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 dengan capaian 99,98.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu:

1. akurasi data (70%)
2. ketepatan waktu (2%);
3. kelengkapan (3%); dan
4. Tingkat Partisipasi (25%).

Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Seksi Vera selalu koordinasi ke Kanwil DJPb ataupun Dit. APK DJPb
2. Secara reguler memberikan informasi atau pengingat terkait batas-batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi satuan kerja

3. Melakukan monitoring dan menginformasikan ke satker permasalahan laporan keuangan yang harus segera diselesaikan dan melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan K/L
4. Memberikan pengingat kepada satker agar selalu tepat waktu dalam pelaksanaan rekonsiliasi serta memastikan sudah memperoleh status "BAR Sudah Ditandangani" khususnya dalam proses penyusunan LK *Audited* atau status "SHR sudah terbit" pada saat ini (berlakunya MONSAKTI)
5. Sosialisasi/bimtek ke satker terkait Migrasi SAKTI dan *Update* Aplikasi dalam penyusunan LK Audited
6. Melakukan monitoring dan menginformasikan ke satker permasalahan laporan keuangan yang harus segera diselesaikan dan melakukan pendampingan dalam penyusunan Laporan Keuangan K/L
7. Pendampingan penyelesaian to do list dan rekonsiliasi di Kabupaten Landak.
   Telah membuat himbauan terkait pengesahan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga agar segera disahkan ke KPPN

Analisis penyebab

1. Kurangnya pemahaman satuan kerja terkait dengan adanya perubahan penyusunan laporan keuangan sehingga tingkat akurasi data dari satker berpengaruh pada LK KPPN
2. Tingkat partisipasi satker dalam menyelesaikan TDK masih rendah sehingga berpengaruh pada nilai partisipasi satker.
3. Kemungkinan *human error* karena diproses manual.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi IKU berikut adalah sebesar Rp 9.960.000. Realisasi anggaran melebihi 90% yaitu mencapai Rp 9.600.000 dengan capaian output melebihi target yang ditentukan. Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU

Telah dilaksanakan *One on One Meeting* dengan satker untuk menyelesaikan permasalahan sebagai berikut:

1. Transaksi dalam konfirmasi.
2. Saldo tidak normal.
3. LPJ Bendahara.

Rencana aksi masa depan

1. Memberikan pengingat kepada satker agar selalu tepat waktu dalam pelaksanaan rekonsiliasi serta memastikan SHR telah terbit.
2. Melakukan monitoring pagu minus pada triwulan IV agar dapat dilakukan revisi segera.
3. Melakukan monitoring dan menginformasikan ke satker permasalahan laporan keuangan (To do list) yang harus segera diselesaikan dan melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan K/L

2. Sasaran Strategis

Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanaan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminsitratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan

pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

TABEL 3.8
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

SS 2: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,64	4,94	106,24%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana.

Cara ukur / formula

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut:

5 = Sangat Puas

4 = Puas

3 = Cukup Puas

2 = Kurang Puas

1 = Tidak Puas

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 4,65 sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau tahun 2022. Target tersebut meningkat dari target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,64.

Realisasi tahun 2022

Hasil survei kepuasan satker menunjukkan bahwa KPPN Sanggau memiliki indeks kepuasan sebesar 4,87.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Hasil perhitungan survei kepuasan satker secara daring sesuai dengan Surat Nomor S-206/KPN.1703/2022 tanggal 9 Juni 2022. Survei dilaksanakan mulai tanggal 14 Juni 2022 setelah Acara Stakeholders Day sesuai dengan Undangan Nomor UND-9/KPN.1703/2022 tanggal 7 Junl 2022, sampai dengan tanggal 20 Juni 2022.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.9
Capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	4,65	4,65	-	4,65	-	4,65	Maximize / *Take Last Known Value*
Realisasi	-	4,94	4,94	-	4,94	-	4,94	
Indeks Capaian	-	106,24%	106,24%	-	106,24%	-	106,24%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan II tahun 2022) sebesar 4,94 tersebut melampaui target IKU sebesar 4,65 dengan indeks capaian sebesar 106,24%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.10 dan Grafik 3.3.

TABEL 3.10
Perkembangan Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Target	4,52	4,53	4,55	4,64	4,65
Indeks Realisasi	4,61	4,77	4,71	4,87	4,94
Nilai	101,99 %	105,29 %	103,51 %	104,95 %	106,24 %

GRAFIK 3.4
Perkembangan Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2018 - 2022

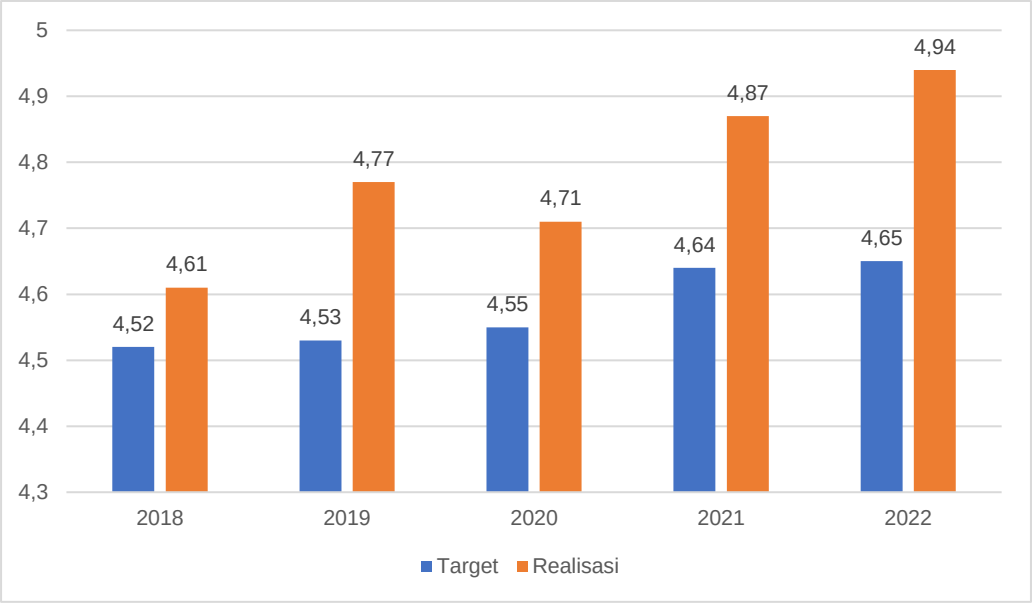

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8 dan Grafik 3.4, Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, kemudian menurun pada tahun 2020, dan kembali meningkat hingga tahun 2022. Pencapaian nilai tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 dengan capaian 4,94.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Survei kepuasan satker terhadap layanan KPPN dikukur melalui Layanan Pencairan Dana dan Layanan Bimbingan dan Konsultasi dari Seksi PDMS; Layanan Konfirmasi Penerimaan dari Seksi Bank; Layanan Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dari Seksi VeraKI, dan Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana dari Subbagian Umum. Terdapat saran/masukan antara lain:

1. Memperpanjang jam layanan penerimaan SPM dengan menyesuaikan jam kerja KPPN (sampai dengan pukul 17.00 WIB).
2. Menyediakan layanan secara daring karena kendala jarak dan menyediakan informasi sarana pengaduan.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pembuatan inovasi layanan berupa aplikasi SKPP Online yang terintegrasi dengan website KPPN.
2. Membuat daftar link untuk berbagi dokumen (blangko, formulir, aturan, update aplikasi, dll) kepada satuan kerja terkait dengan layanan KPPN Sanggau sehingga mempermudah satker dalam mencari dokumen yang diperlukan.
3. Membuat Aplikasi persuratan dan pendukung lainnya melalui LIVES (Layanan Informasi Virtual dan Edukasi Satker).
4. Segera merespon pertanyaan yang diajukan satker melalui berbagai sarana yang telah disediakan oleh KPPN.
5. Mensosialisasikan layanan yang diberikan kepada satker secara periodik melalui media sosial

Analisis penyebab

1. Perubahan layanan secara online memerlukan penyesuaian untuk memenuhi kepuasan satker
2. Ruang layanan belum secara optimal dapat dimanfaatkan oleh satker karena layanan lebih banyak menggunakan non tatap muka

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pagu Anggaran untuk pemenuhan indeks kepuasan layanan tidak tersedia di dalam DIPA Tahun Anggaran 2022, sehingga pembiayaan kegiatan tersebut menggunakan pagu anggaran dari berbagai output dalam rincian kertas kerja. Total jumlah pagu yang dapat digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp 3.500.000 dengan realisasi Rp3.428.700, Efisiensi tidak diperhitungkan secara rinci namun dapat diperkirakan mencapai angka 20% dengan memperhitungkan output yang telah dihasilkan.

Rencana aksi masa depan

1. Meningkatkan kualitas layanan melalui program pengembangan pegawai seperti pelatihan *service excellent* dan *capacity building*;
2. Mengembangkan Aplikasi SKPP Online agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan layanan yang lebih luas.
3. Mengembangkan Aplikasi Persuratan dan pendukung lainnya dalam aplikasi LIVES (Layanan Informasi Virtual dan Edukasi Satker)

3. Sasaran Strategis

Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh DJPb dan unit kerja di bawahnya dalam rangka pengelolaan perbendaharaan.

Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan serta merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel.

TABEL 3.11
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

SS 3: Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	100%	100,60%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.
SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Front Office Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke Middle Office Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank.

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

a. Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
b. ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
c. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
d. Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
e. Data supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM

f. Tidak dalam keadaan force majeur

Cara ukur / formula

∑ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN X 100%

∑ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN

Ket: Kriteria SP2D sebagaimana prasyarat kondisi yang disebutkan pada Definisi IKU

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 99,40%, sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022. Target tersebut sama dengan target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,40%.

Realisasi tahun 2022

Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu tahun 2022 yaitu sebesar 99,40%. Persentase tersebut telah melampaui target.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Data diperoleh dari Aplikasi OM SPAN.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.12
Capaian IKU Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	Maximize / *Average*
Realisasi	100%	99,33%	99,67%	100%	99,7%	100%	99,83%	
Indeks Capaian	100,6%	99,93%	100,27 %	100,6%	100,3%	100,6%	100,44%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99,83% tersebut melampaui target IKU sebesar 99,40% dengan indeks capaian 100,44%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.13 dan Grafik 3.4.

TABEL 3.13
Perkembangan Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu Tahun 2018—2022

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2022
Target	99%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%
Realisasi	99,93%	99,74%	99,55%	100%	99,83%
Nilai	**100,95%**	**100,32%**	**100,15%**	**100,60%**	**100,44%**

GRAFIK 3.5
Perkembangan Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu Tahun 2018—2022

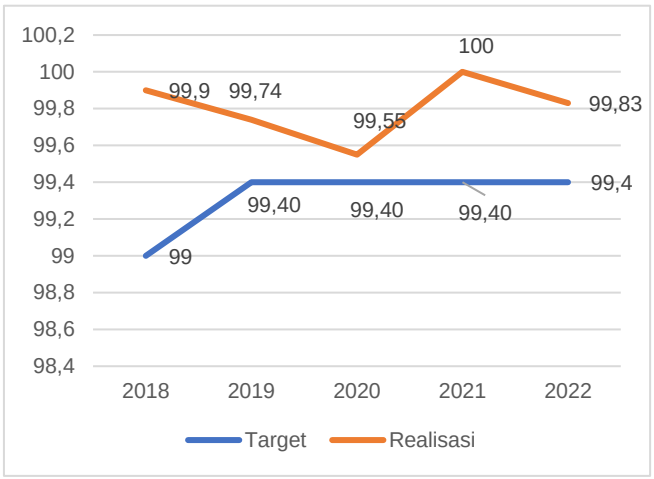

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13 dan Grafik 3.5, Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu meningkat pada tahun 2018 kemudian terus menurun sampai dengan tahun 2020 kemudian meningkat pada tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022. Pencapaian nilai tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 dengan capaian 100%.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu apabila memenuhi janji layanan sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7283/PB.1/2018 yaitu 1 jam yang dimulai dari validasi SPM sampai dengan approval invoice menjadi SP2D melalui Aplikasi SPAN. Keterlibatan banyak user memperpanjang proses penyelesaian SP2D.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik antara Seksi PDMS dan Seksi Bank, sehingga setelah proses persetujuan SPM pada Kasi PDMS agar dapat dilakukan PPR sesegera mungkin.
2. Meningkatkan prinsip kehati-hatian oleh Validator pada saat mengunggah SPM dan melihat kesiapan dari user SPAN pada Seksi PDMS dan Bank sebelum melakukan proses validasi di SPAN.
3. Membuat checklist waktu pemrosesan untuk setiap SPM dari petugas validator sampai dengan Kepala Seksi Bank yang dibubuhkan pada lembar konversi ADK SPM yang berfungsi sebagai alat kontrol penyelesaian SP2D 1 Jam.
4. Pemrosesan SPM secara bertahap di setiap periode.

Analisis penyebab

1. Kegagalan sistem SPAN.
2. Gangguan jaringan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. **SDM**: SDM telah diberikan edukasi dan berkomitmen untuk dapat memenuhi penyelesaian SP2D secara tepat waktu, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99,83% tersebut melampaui target IKU sebesar 99,40% dengan indeks capaian 100,44%.

2. **Anggaran**: Pagu Anggaran untuk pemenuhan indeks kepuasan layanan tidak tersedia di dalam DIPA Tahun Anggaran 2022. Efisiensi tidak diperhitungkan secara rinci namun dapat diperkirakan mencapai angka 20% dengan memperhitungkan output yang telah dihasilkan.

Rencana aksi masa depan

1. Peningkatan kehati-hatian oleh Validator pada saat mengunggah SPM agar melihat kesiapan dari user SPAN pada Seksi PDMS dan Bank.
2. Meningkatkan Koordinasi antara Seksi PDMS dan Seksi Bank.
3. Pegawai yang terlibat dalam proses penerbitan SP2D (Seksi PDMS dan Seksi Bank) harus selalu menjaga komunikasi yang baik agar tidak terlambat dalam memproses SPM menjadi SP2D.
4. Penyelesaian pemrosesan SPM dilakukan secara bertahap di setiap periode yang disepakati oleh Seksi PDMS dan Seksi Bank

4. Sasaran Strategis

Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

TABEL 3.14
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

SS 4: Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
4a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100	100	100%
4b-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90%	96,1%	106,78%
4c-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5%	97,28%	109,92%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

4c-CP **Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI**

IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2022 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI.

Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2022, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut:

A. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2022 secara tepat waktu

Cara ukur / formula

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN. Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialiasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Jumlah satker/user yang telah mengikuti tahapan Total jumlah satker/user yang memenuhi kriteria tahapan	X Bobot Tahapan X 100%

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 100% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022. Target tersebut sama dengan target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%

Realisasi tahun 2022

Realisasi IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 100% sehingga sama dengan target.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2021 sebesar 100% diperoleh dari pemenuhan 12 tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penunjukan Trainers Modul SAKTI KPPN (kelompok modul pelaksanaan dan pelaporan) (3%)
2. Sosialisasi SAKTI Web Full Module kepada Satker Non Piloting (7%)
3. Pendaftaran pengguna SAKTI Satker non piloting (14%)
4. FGD SAKTI KL dengan Kategori Mega (Kemenag, MA, Polri, Kemenkumham) dan DK/TP (9%)
5. Publikasi tahap 1 SAKTI (7%)
6. Fasilitasi Change Readiness Survey Satker Non Piloting (7%)
7. Monev Implementasi SAKTI Satker Piloting SAKTI Tahap I s.d. V (5%)

8. Workshop/Rakor SAKTI manajerial (KPA Satker non piloting) (6%)
9. EUT SAKTI Satker Non Piloting (20%)
10. Publikasi tahap 2 SAKTI (5%)
11. Pemutakhiran data pengguna SAKTI Satker rollout (7%)
12. Pendampingan Pembuatan SPM Gaji Induk Januari TA 2022 (10%)

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.15
Capaian IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	21%	46%	46%	76%	76%	100%	100%	Maximize / *Take Last Known Value*
Realisasi	21%	46%	46%	76%	76%	100%	100%	
Indeks Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.15, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% tersebut memenuhi target IKU sebesar 100% dengan indeks capaian 100%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.16 dan Grafik 3.6.

TABEL 3.16
Perkembangan Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2018—2022

Opini	2018	2019	2020	2021	2022
Target	90%	95%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai	**120%**	**105,26 %**	**100%**	**100%**	**100%**

GRAFIK 3.6
Perkembangan Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2018—2022

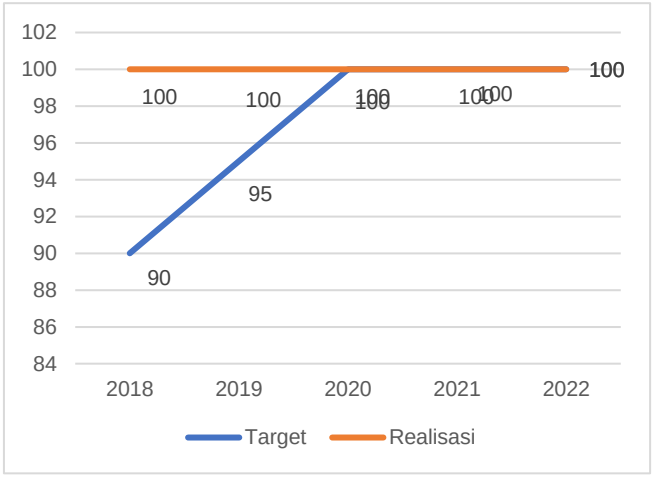

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.14 dan Grafik 3.6, Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI terus stabil setiap tahunnya mencapai persentase sempurna 100%.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Target trajectory implementasi SAKTI diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tanggal 27 Desember 2019. Target proporsi untuk triwulan III 2022 sebesar 78% (tahap 10) untuk KPPN yang tidak mempunyai Satker Piloting tahap V.

Adapun rencana aksi yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan monitoring pelaksanaan SAKTI dan asistensi terhadap satker baru
2. Manajerial informasi mengenai SAKTI terhadap pejabat pejabat perbendaharaan pemegang user SAKTI
3. Pemutakhiran data user SAKTI karena adanya perubahan pejabat perbendaharaan di satker
4. Publikasi rencana roll out implementasi SAKTI Web Full Module via media sosial, WA Group dan website resmi KPPN

Analisis penyebab

1. Jaringan internet tidak stabil
2. Fasilitas User Pandu SAKTI dikunci sehingga satker tidak dapat melaksanakan training setelah EUT

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi IKU berikut adalah sebesar Rp 22.336.000. Realisasi anggaran melebihi 90% yaitu mencapai Rp 21.707.000 dengan capaian output melebihi target yang ditentukan. Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Rencana aksi masa depan

Bimtek/Pendampingan Implementasi SAKTI secara offline baik di KPPN Sanggau maupun dengan mengunjungi satker.

Rencana aksi masa depan

1. Melakukan monitoring pelaksanaan SAKTI dan asistensi terhadap satker baru
2. Manajerial informasi mengenai SAKTI terhadap pejabat pejabat perbendaharaan pemegang user SAKTI
3. Pemutakhiran data user SAKTI karena adanya perubahan pejabat perbendaharaan di satker
4. Publikasi rencana roll out implementasi SAKTI Web Full Module via media sosial, WA Group dan website resmi KPPN

4b-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan

Standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tingkat implementasi diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan penilaian kompetensi PPK/PPSPM pada Satuan Kerja yang meliputi:

1. Pendaftaran Admin Satker SIMASPATEN
2. Pendaftaran user peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM pada SIMASPATEN
3. Verifikasi yang dilakukan oleh KPPN terhadap berkas usulan yang diajukan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM melalui SIMASPATEN; dan

4. Sertifikat PNT/SNT yang diterbitkan untuk peserta yang telah memenuhi dengan status SIMASPATEN adalah Konversi dan Konversi Refreshment

Cara ukur / formula

(persentase pendaftaran Admin Satker x Bobot) + (persentase pendaftaran user peserta x bobot) + (persentase verifikasi usulan x bobot) + (persentase sertifikat PNT/SNT xSNT x bobot)

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 90% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022. IKU ini merupakan lanjutan dari IKU di tahun 2021 dengan target tahun lalu yaitu 30%

Realisasi tahun 2022

Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan tahun 2022 yaitu sebesar 96,10%.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Berdasarkan monitoring tingkat standarisasi kompetensi pejabat yang bersumber dari hasil olah data Aplikasi Simaspaten telah didapat tingkat implementasi sebesar 71,53%. Dengan penjelasan detail perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah sisa PPK dan/PPSPM tahun 2022 yang telah melakukan penilaian kompetensi sebanyak 44 pejabat.
2. Jumlah PPK dan/PPSPM tahun 2022 yang telah melakukan penilaian kompetensi sebagai 49 pejabat.
3. Total sisa PPK dan/PPSM tahun 2022 yang belum melakukan penilaian kompetensi sebanyak 35 pejabat.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.17
Capaian IKU Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	50%	65%	65%	80%	80%	90%	90%	Maximize / *Take Last Known Value*
Realisasi	90%	87,70%	87,70%	90,84%	90,84%	96,1%	96,1%	
Indeks Capaian	120%	120%	120%	113,5%	113,5%	106.78%	106.78%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.17, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 96.1% tersebut melampaui target IKU sebesar 90% dengan indeks capaian 106.78%.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menyelenggarakan Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun rencana aksi yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Segera memproses dan melakukan verifikasi atas usulan calon peserta yang memiliki status ”Siap Verifikasi Unit Pelaksana” dan ”Pengajuan Ulang ke Unit Pelaksana;

2. Mendorong user Admin Satker untuk segera memproses dan melakukan verifikasi atas usulan calon peserta yang memiliki status ”Siap Verifikasi Admin Satker” dan ”Pengajuan Ulang ke Admin Satker”;
3. Mendorong user Peserta yang memiliki status ”Cek Kelengkapan” dan ”Perlu Perbaikan Data” untuk segera melengkapi berkas persyaratan dan mengajukan berkas tersebut melalui aplikasi Simaspaten; dan
4. Menyelenggarakan diklat Penyegaran (*Refreshment*) PPK dan Penyegaran (*Refreshment*) PPSPM.
5. Menghimbau satker untuk dapat mengikuti sertifikasi yang dilaksanakan oleh BPPK.

Analisis penyebab

Partisipasi satker mengikuti penilaian kompetensi bagi pejabat perbendaharaan masih rendah

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. **Anggaran**: Alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi IKU berikut adalah sebesar Rp 6.984.000. Realisasi anggaran melebihi 90% yaitu mencapai Rp 6.636.765 dengan capaian output melebihi target yang ditentukan. Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
2. **SDM**: Berdasarkan data pada Tabel 3.18, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 96.1% tersebut melampaui target IKU sebesar 90% dengan indeks capaian 106.78%. Dari capaian tersebut dengan realisasi anggaran mencapai 90%, maka disimpulkan efisiensi penggunaan sumber daya sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU

Telah dilaksanakan High Level Meeting Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Sanggau sesuai dengan Undangan Nomor UND-4/KPN.1703/2022 tanggal 8 Maret 2022.

Rencana aksi masa depan

1. Meningkatkan partisipasi PPK dan PPSPM untuk mengikuti penilaian kompetensi.
2. Menyampaikan jadwal penilaian kompetensi dari Kantor Pusat DJPb kepada satker.
3. Menyelenggarakan Penyegaran (Refreshment) PPK dan PPSPM.

4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN. Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialiasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Cara ukur / formula

Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi

$0 < x \leq 20$ = tidak efektif

$20 < x \leq 40$ = kurang efektif

$40 < x \leq 60$ = cukup efektif

$60 < x \leq 80$ = efektif

80 < x ≤ 100 = sangat efektif

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 83% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022. Target tersebut meningkat dari tahun 2021 sebesar 82%

Realisasi tahun 2022

Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan tahun 2022 yaitu sebesar 96,10%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi tahun 2022 sebesar 93,64 berdasarkan rata-rata dari hasil perhitungan kuisioner pada pelaksanaan Sosialisasi Mekanisme Pelaporan Data Capaian Output pada Reformulasi IKPA Tahun 2021 dan Overview Implementasi Aplikasi SAKTI Web Full Module tanggal 9 Maret 2021 dengan nilai 91,77 dan pelaksanaan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Oktober 2021 dengan nilai 95,50.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.18
Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	88,50	88,50	-	88,50	88,50	88,50	Maximize / *Average*
Realisasi	-	94,56	94,56	-	94,56	100	97,28	
Indeks Capaian	-	118,2%	118,2%	-	118,2%	112,94%	109,92%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.18, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 97,28 tersebut melampaui target IKU sebesar 88,50 dengan indeks capaian 109,92%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.19. dan Grafik 3.7.

TABEL 3.19
Perkembangan Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi Tahun 2018-2022

Opini	2018	2019	2020	2021	2022
Target	85	86	87	87,5	88,5
Realisasi	86,68	88,46	94,50	93,64	97,28
Nilai	**100,80%**	**102,86%**	**108,62%**	**107,02%**	**109,92%**

GRAFIK 3.7
Perkembangan Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi Tahun 2018-2022

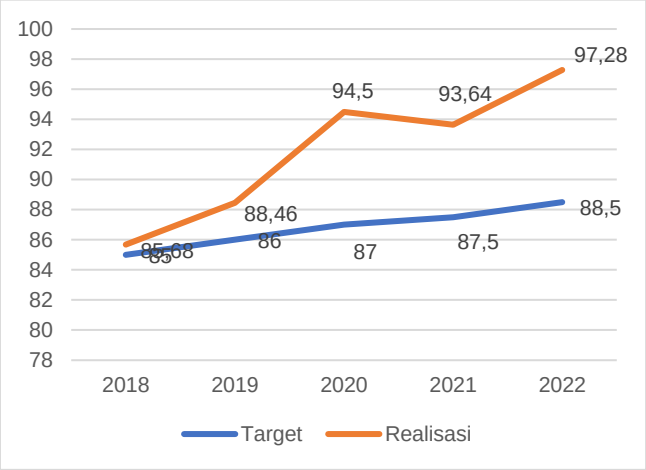

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.20 dan Grafik 3.7, Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi meningkat sampai dengan tahun 2020 dan kembali menurun pada tahun 2021 dan Kembali meningkat pada tahun 2022. Pencapaian tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sebesar 97,28.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan. Untuk bimtek diukur dengan post test 60% sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner 40%.

Adapun tindakan yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan rapat yang diikuti seluruh petugas sebelum kegiatan
2. Melaksanakan sosialisasi/bimtek secara tatap muka kepada satker
3. Penyediaan sarana pendukung sosialisasi/bimtek untuk meningkatkan kenyamanan peserta selama pelaksanaan sosialisasi/bimtek.

Analisis penyebab

1. Persiapan kegiatan yang kurang matang
2. Petugas yang ditunjuk kurang memahami tugasnya dengan baik
3. Sosialisasi yang dilakukan secara daring dianggap kurang efektif

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran: Pagu Anggaran untuk pemenuhan berikut ini tidak tersedia di dalam DIPA Tahun Anggaran 2022, sehingga pembiayaan kegiatan tersebut menggunakan pagu anggaran dari berbagai output dalam rincian kertas kerja. Total jumlah pagu yang dapat digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp 3.500.000 dengan realisasi Rp3.482.700, Efisiensi tidak diperhitungkan secara rinci dikarenakan pagu anggaran dialokasikan untuk beberapa kegiatan lainnya.

Rencana aksi masa depan

1. Pembuatan materi yang menarik dan mudah dipahami.
2. Penentuan peserta sosialisasi/bimtek yang tepat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi dan bimtek.
3. Penyediaan sarana pendukung sosialisasi/bimtek untuk meningkatkan kenyamanan peserta selama pelaksanaan sosialisasi/bimtek.

5. Sasaran Strategis

Pengelolaan kas yang optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah. Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

TABEL 3.20
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kas yang optimal

SS 5: Pengelolaan kas yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	100%	120%
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15	4,00	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, perencanaan kas akumulasi RPD Harian, Rencana Penerimaan Dana, dan proyeksi pengeluaran/penerimaan unit eselon I Kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dituangkan dalam perencanaan kas pemerintah pusat. Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA. Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi Rencana Penarikan Dana Satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan sebagai penarikan dana yang akurat dalam formulasi akurasi RPD Satker. Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Cara ukur / formula

100% - (Rata - Rata Deviasi RPD harian per periode)

Keterangan:

Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi OMSPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD. Penyesuaian deviasi adalah:

a) Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%.

b) Penyesuaian RPD satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya.
c) Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD Harian (4 hari kerja).
d) Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM sesuai RPD harian yang telah disampaikan.
e) Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM
f) Apabila tidak ada transaksi di atas 5 M, maka capaian IKU Not Available (N/A)

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 83% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022. Target tersebut meningkat dari tahun 2021.

Realisasi tahun 2022

Persentase akurasi perencanaan kas tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Persentase tersebut mencapai nilai sempurna dan melampaui target sebesar 83%.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Data diperoleh dari Aplikasi OM SPAN yaitu rata-rata Deviasi RPD harian KPPN setiap periode sebesar 0.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.21
Capaian IKU Persentase akurasi perencanaan kas Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	Maximize / *Average*
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Indeks Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.21, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% tersebut melampaui target IKU sebesar 82% dengan indeks capaian 120%.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja hingga 5 (lima) tahun terakhir

Perkembangan Persentase akurasi perencanaan kas dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.22 dan Grafik 3.8.

TABEL 3.22
Perkembangan Persentase akurasi perencanaan kas Tahun 2018—2022

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	80%	82%	83%
Realisasi	-	-	100%	100%	100%
Nilai	**-**	**-**	**120%**	**120%**	**120%**

GRAFIK 3.8
Perkembangan Persentase akurasi perencanaan kas Tahun 2018—2022

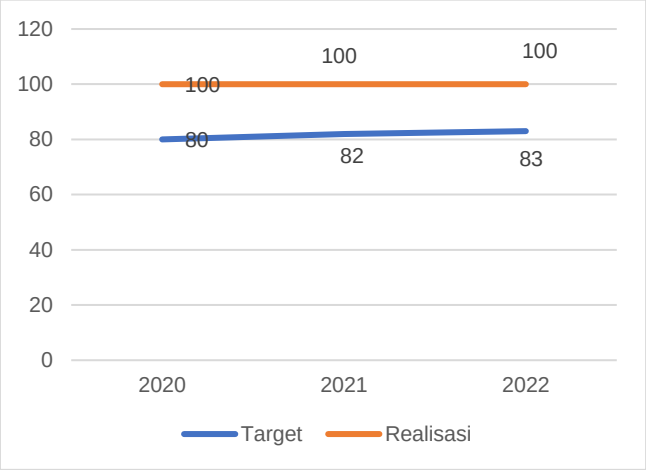

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.20 dan Grafik 3.8, Persentase akurasi perencanaan kas terus stabil setiap tahunnya mencapai persentase sempurna 100%.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-25/PB/2020 tanggal 16 Maret 2020, pencairan dana dilakukan sesuai dengan RPD yang telah disampaikan oleh satker kepada KPPN. RPD wajib disampaikan kepada KPPN atas SPM dengan nilai lebih besar dari Rp5 Miliyar. Sampai dengan triwulan III tidak terdapat SPM yang diajukan oleh satker dengan nilai lebih besar dari Rp5 Miliyar.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Memberitahukan satker agar SPM yang diajukan sesuai jumlah dan waktu pada H-2 sebelum tanggal jatuh tempo RPD.
2. Melakukan konfirmasi kepada satker yang menyampaikan RPD untuk mengajukan SPM sebelum pukul 12.00 WIB.

Analisis penyebab

Persentase akurasi perencanaan kas sudah mencapai nilai sempurna 100%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Rencana aksi masa depan

Monitoring RPD pada Aplikasi SAKTI dan OMSPAN

5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas

Efektivitas pengeluaran kas KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN. Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif. Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk

meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.

Cara ukur / formula

(70% x nilai indeks A) + (30% x nilai indeks B)

A = Penyaluran dana SP2D yang akurat, yang dihitung dengan formula:

$$\frac{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh BO}}{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Indeksasi Penyaluran dana SP2D yang akurat:

- Indeks 4 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 90% - 100%
- Indeks 3 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 80% - 90%
- Indeks 2 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 70% - 80%

Indeks 1 = Penyaluran dana SP2D yang akurat di bawah 70%

B = Kecepatan Penyelesaian Retur, dengan formula:

$$\frac{\{[n\ SP2D\text{-}P\ I1 * 1] + [n\ SP2D\text{-}P\ I2 * 2] + [n\ SP2D\text{-}P\ I3 * 3] + [n\ SP2D\text{-}P\ I4 * 4]\}}{\sum n\ SP2D\text{-}P}$$

Keterangan:

n SP2D-P I1 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 1

n SP2D-P I2 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 2

n SP2D-P I3 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 3

n SP2D-P I4 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 4

∑n SP2D-P = total jumlah SP2D Pengganti

Indeks kecepatan penyelesaian retur SP2D:

- Indeks 4 = SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 10 hari kerja sejak notifikasi retur di OMSPAN
- Indeks 3 = SP2D Pengganti diterbitkan 11 s.d. hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya sejak notifikasi retur pada OMSPAN
- Indeks 2 = Retur SP2D disetor ke kas negara
- Indeks 1 = Retur SP2D terlambat disetor/disetor sebelum waktunya ke kas negara

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 3,15 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022.

Realisasi tahun 2022

Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas tahun 2022 yaitu sebesar 4,00. Indeks tersebut mencapai nilai sempurna dan telah melampaui target sebesar 3,15.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi IKU berikut adalah sebesar Rp 22.336.000. Realisasi anggaran melebihi 90% yaitu mencapai Rp 21.707.000 dengan capaian output melebihi target yang ditentukan. Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun

2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Data diperoleh dari Aplikasi OM SPAN yaitu Penyaluran dana SP2D yang akurat sebesar 99% dan seluruh SP2D Retur diterbitkan di bawah 10 hari kerja sejak notifikasi retur di Aplikasi OM SPAN.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.23
Capaian IKU Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	Maximize / *Average*
Realisasi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Indeks Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.23, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4,00 tersebut melampaui target IKU sebesar 3,15% dengan indeks capaian 120%.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja hingga 5 (lima) tahun terakhir

Perkembangan Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.24 dan Grafik 3.8.

TABEL 3.24
Perkembangan Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas Tahun 2018—2022

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	3,00	3,15	3,15
Realisasi	-	-	4,00	4,00	4,00
Nilai	**-**	**-**	**120%**	**120%**	**120%**

GRAFIK 3.9
Perkembangan Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas Tahun 2020-2022

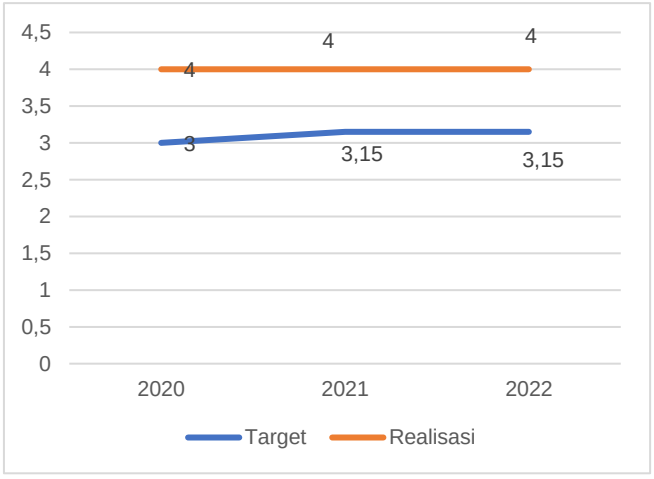

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.22 dan Grafik 3.9, Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas terus stabil setiap tahunnya mencapai indeks sempurna 4,00.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional. Terjadinya retur SP2D menyebabkan terhambatnya penyaluran dana kepada yang berhak dan berdampak pada citra KPPN.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Mengirim surat pemberitahuan retur SP2D setelah muncul notifikasi dari SPAN.
2. Meningkatkan komunikasi dengan satker yang mengalami retur, sehingga surat ralat/perbaikan rekening dan dokumen kelengkapan lainnya bisa dikirim secara waktu..
3. Melakukan proses pengecekan benar tidak nya nomor dan nama rekening pada supplier baru yang akan didaftarkan oleh KPPN
4. Menggunakan fitur validasi rekening pada aplikasi OMSPAN

Analisis penyebab

Retur terjadi saat adanya nama rekening pada suplier lama (perubahan tidak dilaprokan)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi IKU berikut adalah sebesar Rp 22.336.000. Realisasi anggaran melebihi 90% yaitu mencapai Rp 21.707.000 dengan capaian output melebihi target yang ditentukan. Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Rencana aksi masa depan

1. Melakukan proses pengecekan terhadap nomor dan nama rekening supplier baru yang didaftarkan oleh KPPN.
2. Menggunakan fitur validasi rekening pada aplikasi OMSPAN.
3. Mengecek data supplier pada OMSPAN.
4. Apabila ada penyebab retur yang belum diketahui segera dikomunikasikan dengan pusat.

6. Sasaran Strategis

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

TABEL 3.25 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

SS 6: Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99,34	110,38
6b-CP	Indeks Implementasi DIgipay	3	3,8	120
6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90	100	111,11

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

6b-CP **Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa**

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa. Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (PROYEKSI)
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

Cara ukur / formula

NKP TKDD = [0,10 (SYARAT) + (0,20 (PROYEKSI) + 0,30 (SPPSPM) + 0,10 (MONEV) + 0,20 (LK-UAKPA) + 0,10 (SALUR*)] x 100

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 90 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022.

Realisasi tahun 2022

Nilai Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 yaitu sebesar 99,34.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Nilai diperoleh dari hasil penilaian Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-4/PB.2/2022 tanggal 3 Januari 2022.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.26
Capaian IKU Nilai kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	90	90	90	90	90	90	90	Maximize / *Average*
Realisasi	99,22	99,26	99,24	99,71	99,39	99,18	99,34	
Indeks Capaian	110,24 %	110,29 %	110,26%	110,78%	110,43%	110,2%	110,37%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.26, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99,34 tersebut melampaui target IKU sebesar 90 dengan nilai indeks capaian 110,37%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.27 dan Grafik 3.10.

TABEL 3.27

Perkembangan Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018—2022

Opini	2018	2019	2020	2021	2022
Target	70	75	80	90	90
Realisasi	90,42	97,16	98,69	99,33	99,34
Nilai	**120%**	**120%**	**120%**	**110,37%**	**110,37%**

GRAFIK 3.10

Perkembangan Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018—2022

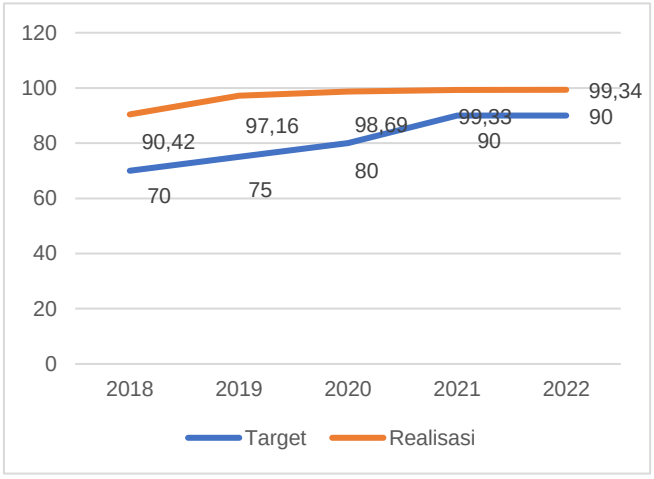

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.27 dan Grafik 3.10, Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pencapaian tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sebesar 99,34.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

1. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa diukur oleh 5 variable, yaitu Ketepatan waktu penyampaian laporan Monev DAK dan Dana Desa; Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh Pemda; Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM; dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA.
2. OPD maupun Desa lambat dalam memenuhi persyaratan penyaluran yang mengakibatkan proses verifikasi oleh BPKAD/DPMD terhambat.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi dan berkoordinasi dengan Bupati, BPKAD, DPMD, Inapektorat terkait dengan DAK Fisik dan Dana Desa.
2. Menghubungin Pemda untuk mendapatkan info DAK Fisik dan Dana Desa yang akan diajukan untuk keperluan proyeksi penyaluran.
3. Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD dan DPMD via Whatsapp dan telepon.
4. FGD dana desa

Analisis penyebab

1. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran mengalami keterlambatan karena OPD maupun Desa lambat dalam memenuhi persyaratan penyaluran.
2. Banyaknya pergantian kepala desa mempengaruhi percepatan penyaluran

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi IKU berikut adalah sebesar Rp 22.336.000. Realisasi anggaran melebihi 90% yaitu mencapai Rp 21.707.000 dengan capaian output melebihi target yang ditentukan. Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tiga pemda lingkup KPPN Sanggau sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Mei 2022 sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-40/KPN.1703/2022.
2. Pada tanggal 24 Juni 2022 sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-60/KPN.1703/2022.
3. Pada tanggal 7 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-112/KPN.1703/2022.

Rencana aksi masa depan

1. monitoring OMSPAN secara berkala untuk memeriksa kelengkapan syarat penyaluran DFDD
2. meningkatkan koordinasi dengan Pemda melalui WAG

6b-N **Indeks Implementasi digipay**

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBP. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2019 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022. Capaian implementasi Digipay diukur dalam 3 parameter yaitu capaian jumlah satker, jumlah vendor, dan jumlah transaksi.

Cara ukur / formula

Indeks Implementasi Digipay =

$$\frac{\textbf{(Indeks Capaian Satker + Indeks Capaian Transaksi + Indeks Capaian Vendor)}}{\textbf{3}}$$

Indeks Implementasi DIgipay:

a. Indeks 4 (sangat baik) jika persentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan >=70%
b. Indeks 3 (Baik) jika presentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan 50 >= sd < 70
c. Indeks 2 (Cukup) jika presentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan 30 >= s.d < 50
d. Indeks 1 (Kurang) jika presentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transkasi dan dan satker setiap triwulan 30 <

Target tahun 2022

IKU ini merupakan IKU yang baru ada di tahun 2022 dengan target indeks 3 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022.

Realisasi tahun 2022

Indeks Implementasi Digipay tahun 2022 yaitu 3,80

Perhitungan / penjelasan perolehan

Sumber data berasal dari
Data capaian satker, vendor, dan transaksi pada Dashboard Aplikasi Digipay

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.28
Capaian IKU Indeks Implementasi DIgipay Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Maximize / *Average*
Realisasi	4	4	4	3,4	3,7	3,8	3,8	
Indeks Capaian	120%	120%	120%	113,33%	112,36%	120%	120%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.28, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 3,8 tersebut melampaui target IKU sebesar 3 dengan indeks capaian 120%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022

Capaian tersebut belum memiliki data historis karena IKU tersebut merupakan IKU baru.

dengan beberapa tahun terakhir

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

KPPN Sanggau sebagai Kuasa BUN perlu mensosialisasikan kepada satker dalam rangka mencapai target implementasi *Digipay* dalam 3 parameter yaitu capaian jumlah satker, jumlah vendor, dan jumlah transaksi.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyelenggarakan sosialisasi kepada pejabat pengelola keuangan satuan kerja.
2. Membuat komitmen bersama pimpinan satuan kerja (dalam bentuk penandatanganan Komitmen Bersama) untuk menggunakan platform Digipay dalam transaksi Uang Persediaan.
3. Melakukan evaluasi dengan mendata satuan kerja yang telah melakukan pendaftaran *user.*
4. Asistensi dalam perekaman *user marketplace* dan vendor
5. Koordinasi dengan Bank Operasional *Digipay* yaitu Bank Mandiri dan BRI dalam rangka sosialisasi *Digipay*, MCM, dan CMS sebagai wahana pembayaran *marketplace*
6. Penekanan penggunaan *marketplace* kepada KPA

Analisis penyebab

1. Tingkat Pemahaman Satuan Kerja yang masih minim terkait dengan penggunaan Digipay.
2. Proses bisnis digipay yang belum user friendly sehingga partisipasi penyedia jasa/barang untuk menjadi vendor digipay belum maksimal.
3. kekurangtahuan vendor akan adanya program Digipay.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya :

1. **Anggaran** : Pagu Anggaran untuk kegiatan implementasi Digipay tidak tersedia di dalam DIPA Tahun Anggaran 2022, sehingga pembiayaan kegiatan tersebut menggunakan pagu anggaran dari berbagai output dalam rincian kertas kerja. Total jumlah pagu yang dapat digunakan pada kegiatan ini sebesar Rp32.296.000 dengan realisasi Rp7.500.000, Efisiensi tidak diperhitungkan secara rinci dikarenakan pagu anggaran dialokasikan untuk beberapa kegiatan lainnya.

Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU

1. Telah dilakukan pendampingan Penyelesaian *To Do List* (Rekonsiliasi) dan Bimbingan *Digipay* sesuai undangan nomor UND-22/KPN.1703/2022
2. Koordinasi Percepatan Implementasi Digipay dan KKP dengan Bank Mandiri dan satuan kerja lingkup KPPN Sanggau

Rencana aksi masa depan

1. Koordinasi dan sosialisasi dengan satker agar dapat menjadikan *Digipay* sebagai sarana belanja utama bagi satker
2. Menyelenggarakan sosialisasi kepada satuan kerja dan mengidentifikasi satuan kerja yang potensial untuk menggunakan platform Digipay dalam pelaksanaan pengadaan barang dan pembayaran APBN.
3. Koordinasi dengan vendor agar lebih memahami *Digipay* dan memperluas vendor yang bergabung dalamplatform *Digipay.*
4. Monev bank, satker, dan vendor agar terjadi pemahaman bersama mengenai *Digipay*

6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang di dalamnya memuat informasi kinerja yang hendak dicapai Satker dalam satu tahun anggaran. Informasi kinerja tersebut di antaranya berupa target Rincian Output (RO) yang mencantumkan target kuantitatif dari produk akhir berupa barang/jasa yang akan dihasilkan dari berbagai aktivitas belanja Satker. Untuk mendukung peran BUN dalam mengawal ketercapaian RO dan outcome belanja pemerintah, diperlukan mekanisme pelaporan dan pengumpulan data capaian output Satker. Proses pelaporan tersebut dilakukan melalui aplikasi OMSPAN yang dilaksanakan secara bulanan.

Cara ukur / formula

Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output = Rata-Rata Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan dalam satu triwulan.

Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan = [(Jumlah Satker Yang Melaporkan data di open period reguler x 1,0) + (Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period tambahan x 0,5)] / Jumlah Satker yang Wajib Melaporkan Data Capaian Output.

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 90 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022. Lebih banyak 1 angka apabila dibandingkan dengan target di tahun 2021.

Realisasi tahun 2022

Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker tahun 2022 yaitu sebesar 100.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Data diperoleh dari Aplikasi OM SPAN yaitu seluruh satker melaporkan data capaian output setiap bulan.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.29
Capaian IKU Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
arget	90	90	90	90	90	90	90	
ealisasi	100	100	100	100	100	100	100	Maximize
ıdeks apaian	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	*Average*

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.29, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100 tersebut melampaui target IKU sebesar 90 dengan indeks capaian 111,11%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022

Perkembangan Nilai dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.30 dan Grafik 3.10.

TABEL 3.30
Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Tahun 2018—2022

Opini	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	-	89	90
Realisasi	-	-	-	100	100
Nilai	-	-	-	**112,36%**	**111,11%**

GRAFIK 3.11
Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Tahun 2021—2022

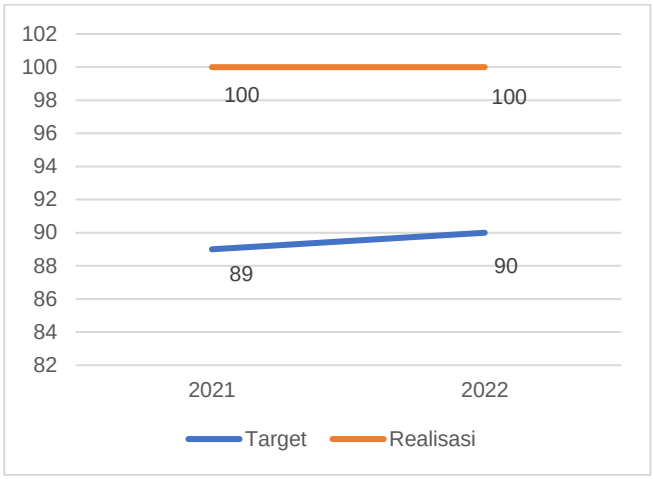

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.27 dan Grafik 3.11, Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output selama 2 tahun terakhir mendapat nilai 100 atau sempurna.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Satker menyampaikan data capaian output paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya melalui OMSPAN. Data capaian output meliputi Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) dan Progres Capaian Rincian Output (PCRO).

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Reminder kepada satuan kerja setiap awal bulan
2. Melaksanakan konsultasi kendala dalam upload Capaian Output pada OMSPAN.

Analisis penyebab

Berdasarkan monitoring pada OMSPAN, tingkat partisipasi penyampaian laporan masih rendah sampai akhir periode pelaporan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Rencana aksi masa depan

1. Melakukan reminder kepada satuan kerja setiap awal bulan untuk segera melakukan upload Capaian Output.
2. Memberikan konsultasi kepada satker yang memiliki kendala dalam upload Capaian Output pada OMSPAN.
3. Memeriksa kembali kebenaran pengisian data dalam hal terdapat output yang progresnya belum 100% atau RVRO-nya di bawah target DIPA. Jika kondisi tersebut memang kondisi riil, maka mengisi keterangan yang memadai.

7. Sasaran Strategis

Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

TABEL 3.31
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

SS 7: Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	3,25	4	120%
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%	100%	101,52%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

7a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan:

1) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%)
2) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan. Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja dan Kas di BP (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:
Triwulan I 2022 = Desember 2021 - Februari 2022
Triwulan II 2022 = Maret - Mei 2022
Triwulan III 2022 = Juni - Agustus 2022
Triwulan IV 2022 = September - November 2022

Cara ukur / formula

Capaian IKU = (Indeks Rekonsiliasi Internal x 50%) + (Indeks Rekonsiliasi Eksternal x 50%)

Target tahun 2022

IKU ini merupakan IKU yang baru ada di tahun 2022 dengan target indeks 3,25 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022.

Realisasi tahun 2022

Pada tahun 2022 indeks yang dicapai sempurna yaitu 4.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Data diperoleh dari Monitoring Rekonsiliasi pada Aplikasi e-Rekon&LK.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.32
Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
arget	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	
ealisasi	4	N/A	4	4	4	4	4	Maximize *Average*
ıdeks apaian	120%	N/A	120%	120%	120%	120%	120%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.32, nilai realisasi tahunan IKU mencapai indeks 4 tersebut melampaui target IKU sebesar 3,25% dengan indeks capaian 120%.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

Capaian tersebut belum memiliki data historis karena merupakan IKU baru.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Tahun 2022 adalah tahun penerapan SAKTI full module bagi seluruh satuan kerja. Penyusunan LKBUN KPPN juga mencangkup penyusunan LK dari satuan kerja lingkup KPPN Sanggau. Proses awal penyusunan LK Satker pada tahun 2022 menggunakan SAKTI adalah pelaksanaan Migrasi Saldo Awal. Pada saat ini proses migrasi masih berlangsung, sehingga penyusunan LKBUN KPPN dan Satker belum dapat dilakukan, menunggu arahan lebih lanjut dari kantor pusat.

1. Sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-12/PB/PB.6/2021 proses rekonsiliasi eksternal tahun 2021 dimulai tanggal 30 Juni 2021 proses rekonsiliasi bulan Januari – Mei 2021 namun demikian proses rekonsiliasi tersebut tidak dihitung dalam capaian IKU triwulan II 2021 sehingga untuk data capaian IKU untuk triwulan II 2021 “N/A”
2. Pelaksanaan rekonsiliasi bulan Mei 2021 dikecualikan dari pengenaan sanksi.
3. Triwulan III sudah dilakukan rekonsiliasi dengan menggunakan aplikasi MONSAKTI

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tentang pelaksanaan rekonsiliasi bulanan pada TA 2022 secara rutin
2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022
3. Menyampaikan pemberitahuan kepada satker tentang jadwal *open periode* dan *close periode* rekonsiliasi
4. Berkomunikasi dan melakukan pendampingan agar rekonsiliasi sudah selesai sebelum batas *close periode*
5. Sosialisasi/bimtek ke satker terkait Migrasi SAKTI dan *Update* aplikasi dalam penyusunan LK *Audited*
6. Telah dilakukan Pendampingan penyelesaian TO DO list di Kab. Landak

Analisis penyebab

1. Adanya satuan kerja yang menyelesaikan rekonsiliasi di penghujung batas waktu
2. Masih sedikit satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi mandiri sehingga tujuan melakukan rekonsiliasi eksternal belum maksimal

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya :

1. **Anggaran** : Pagu anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp9.960.000 dengan realisasi sebesar Rp9.600.000 dengan capaian output melebihi target yang ditentukan. Efisiensi anggaran sudah baik dan mencapai angka 20%.

Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU

1. KPPN Sanggau telah manyampaikan surat pemberitahuan terkait pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dengan nomor surat S-235/KPN.1703/2022
2. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 menggunakan SAKTI sesuai S-271/KPN.1703/2022

Rencana aksi masa depan

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada satker tentang jadwal open periode dan close periode rekonsiliasi
2. Berkomunikasi dan melakukan pendampingan agar rekonsiliasi sudah selesai sebelum batas close periode.

7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018.

Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2022 merupakan rata-rata data bulan Desember 2021, bulan Januari dan Februari tahun 2022. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2022 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun 2022. dst.

Cara ukur / formula

$$\frac{\sum \text{LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \text{ X } 100\ \%$$

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 98,5% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022. Target tersebut sedikit lebih banyak dibandingkan dengan target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu 98%.

Realisasi tahun 2022

Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Data diperoleh dari Daftar LPJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Aplikasi SPRINT yaitu seluruh Bendahara Satker menyampaikan LPJ yang andal secara tepat waktu.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.33
Capaian IKU Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
arget	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	Maximize *Average*
ealisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ndeks apaian	101,52%	101,52%	101,52%	101,52%	101,52%	101,52%	101,52%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.33, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% tersebut melampaui target IKU sebesar 98,5% dengan indeks capaian 101,52%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu dari tahun 2018 s.d. 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.34 dan Grafik 3.12.

TABEL 3.34
Perkembangan Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Tahun 2018 - 2022

Opini	2018	2019	2020	2021	2022
Target	97%	97,5%	98%	98%	98,5%
Realisasi	99,62%	99,90%	100%	100%	100%
Nilai	**102,70%**	**101,98%**	**102,04%**	**102,04%**	**101,52%**

GRAFIK 3.12
Perkembangan Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Tahun 2018 – 2022

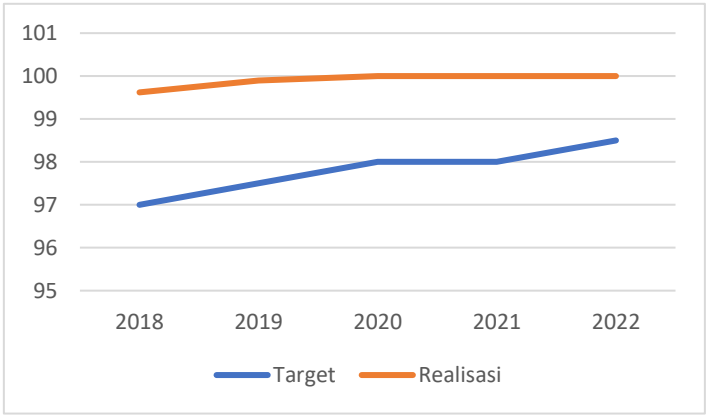

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.31 dan Grafik 3.12, Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu ada kenaikan di tahun 2018 sampai 2020 kemudian sampai dengan tahun 2022 dengan capaian nilai sempurna 100%.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

1. Proses LPJ bendahara menggunakan SAKTI berbeda dengan tahun lalu yang masih menggunakan SAS.
2. Proses LPJ masih sering terkendala mengunduh pdf LPJ pada aplikasi SPRINT
3. Satker masih sering lupa menyertakan nota konfirmasi dan rekening koran

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Setiap awal bulan menyampaikan imbauan melalui WA *group* agar segera meng-*upload* ADK LPJ di Aplikasi SPRINT
2. Memberitahukan kepada satker apabila terdapat kendala dalam proses penyusunan LPJ dapat mengbungi KPPN untuk dibantu
3. Mengingatkan satker melalui surat terkait batas waktu penyampaian LPJ
4. Menyampaikan pengingat kepada satker terkait batas akhir penyampaian LPJ Bendahara
5. Memberikan asistensi kepada satuan kerja apabila terdapat kendala dalam proses penyusunan LPJ

Analisis penyebab

1. Tingkat kepedulian satuan kerja dalam menyampaikan LPJ masih kurang sehingga beberapa satuan kerja mengirimkan ADK LPJ pada aplikasi SPRINT di akhir batas waktu yang ditetapkan, yang berpotensi mengakibatkan keterlambatan apabila terdapat data yang tidak sesuai dan tidak dapat diselesaikan pada hari itu.
2. Terdapat satker baru yang baru menggunakan aplikasi SAKTI

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian IKU

Telah dilaksanakan *One on One Meeting* dengan satker untuk menyelesaikan permasalahan sebagai berikut:

1. Transaksi dalam konfirmasi.
2. Saldo tidak normal.
3. LPJ Bendahara.

Rencana aksi masa depan

1. Menyampaikan pengingat kepada satker terkait batas akhir penyampaian LPJ Bendahara, khususnya bulan Januari dikarenakan perbedaan batas akhir LPJ yaitu tanggal 24 Januari
2. Memberikan asistensi kepada satuan kerja apabila terdapat kendala dalam proses penyusunan LPJ

8. Sasaran Strategis

Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

TABEL 3.35
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi

SS 8: Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84,5	92,66	109,65%
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85	94,6	111,29%
8c-N	Nilai rata-rata hard competency	78	96,8	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Cara ukur / formula

Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 84,5 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022. Target tersebut meningkat sedikit dari target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu 84.

Realisasi tahun 2021

Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization tahun 2022 yaitu sebesar 92,66.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Nilai diperoleh dari hasil penilaian Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal, Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-281/PB/2022.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.36
Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
arget	-	-	-	-	-	84,5	84,5	Maximize *Take Las Known Value*
ealisasi	-	-	-	-	-	92,66	92,66	
ıdeks apaian	-	-	-	-	-	109,66%	109,66%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.33, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2022) sebesar 92,66 tersebut melampaui target IKU sebesar 84,5 dengan indeks capaian 109,66%.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja hingga 5 (lima) tahun terakhir

Perkembangan Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.34 dan Grafik 3.12.

TABEL 3.37
Perkembangan Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* Tahun 2018—2022

Opini	2018	2019	2020	2021	2022
Target	81	83	83	84	84,5
Realisasi	81,04	85,89	84,12	89,21	92,66
Nilai	**100,5%**	**103,48%**	**101,35%**	**106,20%**	**109,65%**

GRAFIK 3.13
Perkembangan Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* Tahun 2018—2022

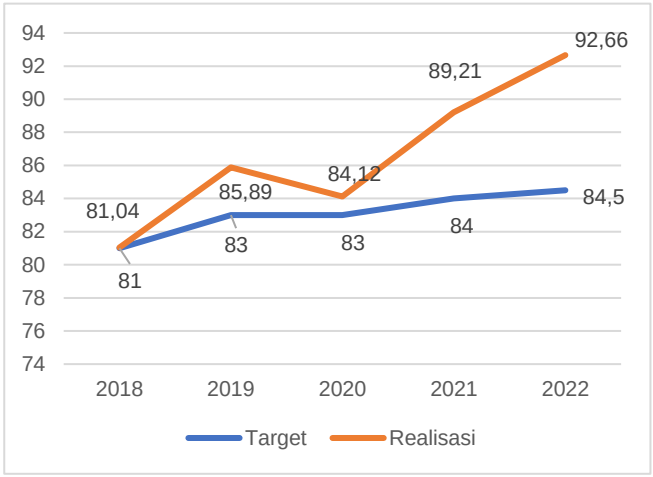

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.34 dan Grafik 3.13, Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pencapaian tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sebesar 92,66.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Penyusunan Laporan SFO memerlukan waktu lama dengan jumlah dokumen yang banyak sehingga diperlukan waktu yang banyak untuk menyusun laporan secara lengkap dan didukung dokumen dari seluruh kegiatan sesuai prinsip SFO.

Adapaun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan DKO setiap bulan
2. Menyusun dan monitoring rencana kegiatan
3. Melengkapi seluruh dokumen dari kegiatan yang telah dilaksanakan
4. Melaksanakan internalisasi SFO kepada seluruh pegawai

Analisis penyebab

Seluruh dokumen yang diperlukan bersumber dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan unit kerja sehingga diperlukan penatausahaan yang baik

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi IKU berikut adalah sebesar Rp1.500.000 yaitu berupa pencetakan dan penataan dokumen kinerja. Realisasi anggaran melebihi 90% dengan capaian output melebihi target yang ditentukan. Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Rencana aksi masa depan

1. Menyusun bukti dukung laporan SFO setiap selesai pelaksanakan kegiatan
2. Internalisasi pengelolaan kinerja kepada seluruh pegawai

8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah DJPb, dan KPPN. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal. Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanakan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Kanwil DJPb, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)
3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Cara ukur / formula

Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 85 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022. Target tersebut meningkat dari target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu 83.

Realisasi tahun 2022

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal tahun 2022 yaitu sebesar 94,60

Perhitungan / penjelasan perolehan

Nilai diperoleh dari hasil penilaian Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-1130/WPB.17/2022 tanggal 20 Desember 2022.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021

TABEL 3.38
Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
arget	-	-	-	-	-	85	85	Maximize *Take Las Known Value*
ealisasi	-	-	-	-	-	94,6	94,6	
ndeks apaian	-	-	-	-	-	111,29%	111,29%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.38, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2022) sebesar 94,6 tersebut melampaui target IKU sebesar 85 dengan indeks capaian 111,29%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.39 dan Grafik 3.13.

TABEL 3.39

Perkembangan Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2018—2022

Opini	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	75	80	83	85
0Realisasi	-	92,45	92,83	92,91	94,6
Nilai	**-**	**120%**	**116,04%**	**111,94%**	**111,29**

GRAFIK 3.14

Perkembangan Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2019—2022

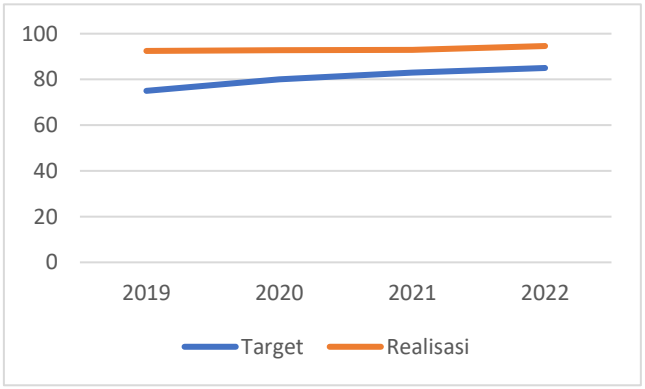

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.36 dan Grafik 3.14, Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terus meningkat setiap tahunnya. Pencapaian tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 sebesar 94,6.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

1. Pelaksanaan tugas pelaksanaan internal merupakan gabungan dari seluruh kegiatan yang dilakukan seksi Kepatuhan Internal dalam satu tahun antara lain Laporan Monev KI, Laporan Pengendalian Internal, Laporan Kode Etik, Laporan Mitigasi Risiko yang harus dilaksanakan dan dilaporkan setiap bulan atau triwulanan.
2. Kurangnya pemahaman pegawai terkait tugas tugas kepatuhan internal yang seringkali membuat terlambat dalam menyampaikan laporan.
3. Banyaknya laporan yang harus disusun memerlukan kecepatan dan kecermatan

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Membuat *reminder* untuk mengingatkan tugas-tugas yang harus diselesaikan setiap bulan
2. Melakukan konsultasi dan konfirmasi dengan UKI W setiap bulan untuk memastikan tugas dan laporan kepatuhan internal telah dipenuhi semua
3. Mempelajari hasil analisis penilaian dari Bidang SKKI terkait Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
4. Memperbaiki format piagam dan peta risiko yang masih kurang sesuai
5. Memastikan selalu ada temuan dalam pelaporan LHPPU
6. Membuat media komunikasi yang masif terkait pelaksanaan manajemen risiko

Analisis penyebab

1. Adanya laporan yang kurang tidak disampaikan ke Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat sehingga mengurangi nilai karena banyaknya laporan yang harus disusun
2. Pejabat dan pegawai baru di seksi Veraki sehingga belum memahami terkait aplikasi PRO-UKI, Incrima dan pelaporan lainnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi IKU berikut adalah sebesar Rp1.500.000 yaitu berupa pencetakan dan penataan kepatuhan internal. Realisasi anggaran melebihi 90% dengan capaian output melebihi target yang ditentukan. Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Rencana aksi masa depan

1. Membuat media komunikasi yang masif terkait pelaksanaan manajemen risiko
2. Berkoordinasi dengan Kanwil terkait penyusunan Risiko TA 2023

8c-N Nilai rata-rata hard competency pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang dijalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan. Untuk Kemenkeu-Three KPPN, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai KPPN. Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available). Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol). Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

Cara ukur / formula

$$\frac{\text{Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai KPPN}}{\text{Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency}}$$

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 78 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022. Target tersebut sama dengan target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu 78.

Realisasi tahun 2022

Nilai rata-rata hard competency pegawai tahun 2022 yaitu sebesar 96,8.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Data diperoleh dari Laporan hasil pelaksanaan ujian pada Aplikasi Training. Nilai diperoleh dari rata-rata hasil tes hard competency 9 pegawai.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.40
Capaian IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP

Target	-	-	-	-	-	78	78	Maximize / *Take Last Known Value*
Realisasi	-	-	-	-	-	96,8	96,8	
Indeks Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.37, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2021) sebesar 96,8 tersebut melampaui target IKU sebesar 78 dengan indeks capaian 120%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Nilai rata-rata *hard competency* pegawai dari tahun 2018 s.d. 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.41 dan Grafik 3.14.

TABEL 3.41
Perkembangan Nilai rata–rata hard competency pegawai Tahun 2018—2022

Opini	2018	2019	2020	2021	2022
Target	77	77	77	78	78
Realisasi	90	86,93	90,44	93,50	96,8
Nilai	**116,74**	**112,90**	**117,45**	**119,87**	**120**

GRAFIK 3.15
Perkembangan Nilai rata–rata hard competency pegawai Tahun 2018—2022

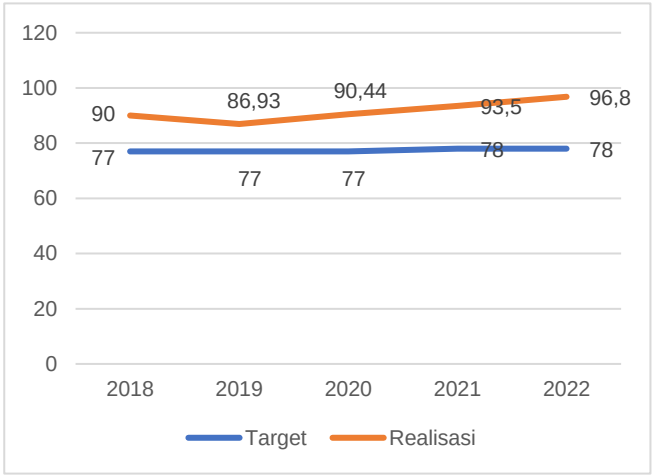

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.38 dan Grafik 3.15, Nilai rata–rata *hard competency* pegawai menurun pada tahun 2019 dan kembali meningkat sampai dengan tahun 2022. Pencapaian nilai tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 dengan nilai 96,8.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Pelaksanaan *hard competency* secara online, soal sesuai dengan tusi pegawai berkenaan. Berdasarkan hasil capaian tahun 2020-2021 yang mengalami peningkatan maka pada tahun 2022 seluruh pegawai akan dapat mencapai target nilai 78 dengan *extra effort* dan asistensi atasan langsung

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan GKM dan internalisasi yang diikuti oleh seluruh pegawai
2. Menerbitkan surat tugas mengikuti bimtek
3. FGD dan sejenisnya sesuai tusi pegawai
4. Mengikuti *e-learning* mandiri

Analisis penyebab

Kenaikan target memerlukan extra effort dari para pegawai baru dengan melakukan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang lebih maksimal sebelum pelaksanaan tes online.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi IKU berikut adalah sebesar Rp3.500.000. Realisasi anggaran melebihi 90% dengan capaian output melebihi target yang ditentukan. Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Rencana aksi masa depan

1. Menyampaikan jadwal pembelajaran *open access* kepada pegawai
2. Melaksanakan GKM, *sharing session,* dan internalisasi peraturan terbaru
3. Melaksanakan DKI dan CnC

9. Sasaran Strategis

Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkannya adalah melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

TABEL 3.42
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel

SS 9: Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	99,68%	104,38%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83	91,34	110,05%
9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	166,07%	120%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang

lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Cara ukur / formula

Perhitungan realisasi IKU =
Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret
Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni
Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September
Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 95,5% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022. Target tersebut sama dengan target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 95,5% dan lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Perbendaharaan tahun 2020-2024 yaitu sebesar 95%.

Realisasi tahun 2022

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN tahun 2022 yaitu sebesar 99,68%.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Nilai diperoleh dari 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember sebesar 99,32 dan 60% Capaian SMART sebesar 99,92.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.43
Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
arget	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Maximize *Take Las Known Value*
ealisasi	100%	100%	100%	99,13%	99,13%	99,68%	99,68%	
ıdeks apaian	104,71%	104,71%	104,71%	103,8%	109,8%	104,37%	104,37%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.43, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2022) sebesar 99,68% tersebut melampaui target IKU sebesar 95,5% dengan indeks capaian 104,37%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.44 dan Grafik 3.16.

TABEL 3.44
Perkembangan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2018—2022

Opini	2018	2019	2020	2021	2022
Target	95%	95%	95%	95,5%	95,5%
Realisasi	98,25%	93,22%	95,55%	97,39%	99,68%
Nilai	**103,42%**	**98,13%**	**100,58%**	**101,98%**	**104,37%**

GRAFIK 3.16
Perkembangan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2018—2022

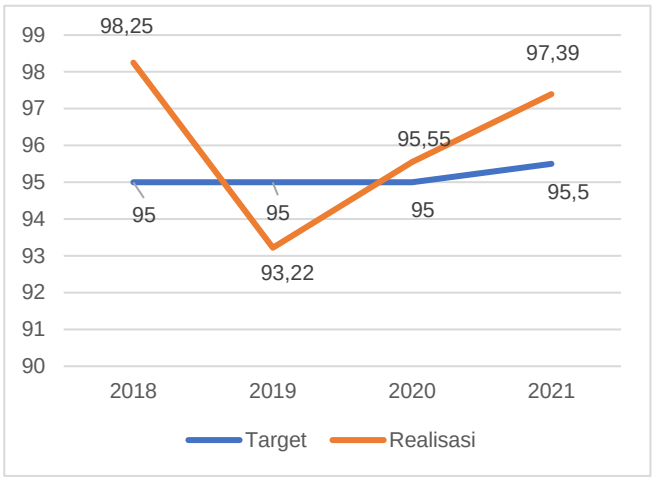

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.41 dan Grafik 3.16, Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN menurun dan tidak mencapai target pada tahun 2019 kemudian dapat terus meningkat kembali sampai dengan tahun 2022. Pencapaian nilai tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 dengan capaian 99,68%.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

1. Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
2. Penyerapan anggaran sebesar 98%.
3. Layanan dan kegiatan KPPN tanpa tatap muka (online).

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan pembayaran tagihan secara tepat waktu.
2. Melakukan input data SMART dan E-Monev secara tepat waktu.
3. Melakukan koordinasi dengan PIC SMART Kantor Pusat.
4. Monitoring Realisasi Capaian IKPA secara berkala.

Analisis Penyebab

Indikator Deviasi Halaman III belum maksimal, disebabkan belum konsistensinya pelaksanaan rencana kegiatan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi pada aplikasi SMART sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Rencana aksi masa depan

1. Monitoring pelaksanaan rencana kegiatan.
2. Revisi Hal III DIPA setiap triwulan.
3. Melakukan input data SMART dan E-Monev secara tepat waktu.
4. Percepatan realisasi belanja operasional.

9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) DJPb. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
b) keakuratan data laporan keuangan
c) kepatuhan pelaksanaan anggaran
d) Penyajian Laporan Keuangan
e) Partisipasi dan
f) Laporan BMN.

Cara ukur / formula

Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 83 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau tahun 2022. Target tersebut meningkat dari target kontrak kinerja tahun sebelumnya sebesar 82.

Realisasi tahun 2022

Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB tahun 2022 yaitu sebesar 91,34.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Nilai diperoleh dari hasil penilaian Kanwil DJPb sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat Nomor KEP-158/WPB.17/2022

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.45
Capaian IKU Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
arget	-	-	-	-	-	83	83	Maximize *Take Las Known Value*
ealisasi	-	-	-	-	-	91,34	91,34	
ıdeks apaian	-	-	-	-	-	110,04%	110,04%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.45, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2021) sebesar 91,34 tersebut melampaui target IKU sebesar 83 dengan indeks capaian 110,04%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.46 dan Grafik 3.7.

TABEL 3.46
Perkembangan Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB Tahun 2018—2022

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	81	82	83
Realisasi	-	-	84,50	86	91,34
Nilai	**-**	**-**	**104,32%**	**104,88%**	**110,05%**

GRAFIK 3.17
Perkembangan Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB Tahun 2018—2022

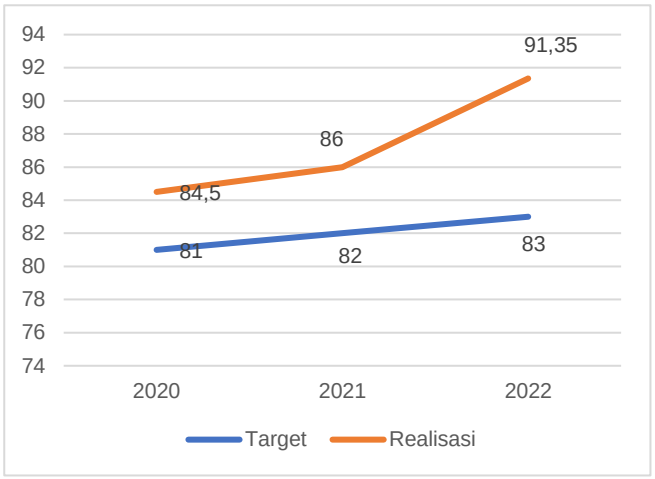

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.46 dan Grafik 3.17, Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB meningkat dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 dengan capaian 91,35.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Kriteria penilaian kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan meliputi:

1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
2. Keakuratan data laporan keuangan
3. Kepatuhan pelaksanaan anggaran
4. Penyajian Laporan Keuangan
5. Partisipasi
6. Laporan BMN

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan monitoring transaksi keuangan dan BMN pada MONSAKTI
2. Koordinasi dengan KPPN selaku Kuasa BUN
3. Penyusunan laporan lebih awal
4. Redesain Laporan Keuangan dan BMN
5. Koordinasi dengan Unit Akuntansi dan BMN Tingkat Wilayah
6. Meningkatkan keaktifan pengelola UAKPA dan UAKPB

Analisis Penyebab

1. Penyajian laporan perlu ditingkatkan
2. Estetika penulisan perlu perbaikan
3. Transaksi BMN yang belum valid

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya:

1. **Anggaran**: Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.
2. **SDM**: Para pengelola keuangan telah secara efektif dan efisien melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman terkait penyusunan LK UAKPA dan UAKPB

Rencana aksi masa depan

1. Melakukan monitoring transaksi keuangan dan BMN pada MONSAKTI
2. Penyusunan laporan lebih awal
3. Mengikuti Diklat atau *e-learning* yang berkaitan dengan penyusunan LK dan laporan BMN

9c-N Tingkat kualitas pengelolaan BMN

Kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan tahun 2022 difokuskan pada pengelolaan aset dengan unsur penilaian antara lain meliputi: temuan BPK atas pengelolaan BMN, penyampaian RKBMN, wasdal, tindak lanjut pengelolaan BMN, dokumen kepemilikan BMN, serta kelengkapan pengisian master aset rumah negara pada aplikasi SIMAN (SK PSP, SIP, SK Gol, Konstruksi, dan Fasilitas). Unsur penilaian pengadaan meliputi pengisian SIRUP dan pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik. Dampak yang dapat terjadi adalah keterlambatan penyampaian laporan BMN dan kegagalan penggunaan sistem aplikasi pengadaan yang belum pernah dilaksanakan.

Cara ukur / formula

IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan tingkat kualitas pengelolaan BMN dan persentase dukungan tingkat kualitas pengadaan.

Target tahun 2022

Target IKU tersebut untuk tahun 2022 adalah sebesar 100% sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Sanggau Tahun 2022. Target IKU tersebut sama dengan target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya yaitu 100% dan sama dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Perbendaharaan tahun 2020-2024 yaitu sebesar 100%.

Realisasi tahun 2022

Tingkat kualitas pengelolaan BMN tahun 2022 yaitu sebesar 166,07%.

Perhitungan / penjelasan perolehan

Nilai diperoleh dari hasil penilaian Sekretariat Direktorat Jenderal, Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-151/PB.1/2023 tanggal 11 Januari 2023.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022

TABEL 3.47
Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan BMN Tahun 2022

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
arget	-	-	-	-	-	100%	100%	Maximize
ealisasi	-	-	-	-	-	166,07%	166,07%	*Take Las Known Value*
ıdeks apaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.47, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2022) sebesar 166,07% tersebut melampaui target IKU sebesar 100% dengan indeks capaian 120%.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Tingkat kualitas pengelolaan BMN dari tahun 2018 s.d 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.48 dan Grafik 3.18.

TABEL 3.48
Perkembangan Tingkat kualitas pengelolaan BMN Tahun 2018—2022

Opini	2018	2019	2020	2021	2022
Target	91%	92%	92%	100%	100%
Realisasi	98,25%	96,07%	97,08%	108,75%	166,07%
Nilai	**107,97%**	**104,42%**	**105,52%**	**108,75%**	**120%**

GRAFIK 3.18
Perkembangan Tingkat kualitas pengelolaan BMN Tahun 2018—2022

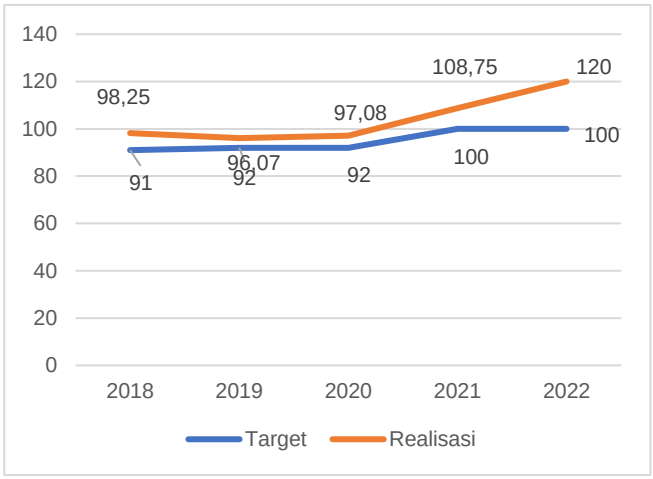

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.48 dan Grafik 3.18, Tingkat kualitas pengelolaan BMN menurun pada tahun 2019 dan kembali meningkat sampai dengan tahun 2022. Pencapaian tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 dengan capaian 120%.

Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan, serta analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko

Peningkatan pengelolaan data BMN yang optimal dilakukan evaluasi oleh Kantor Pusat berdasarkan pengukuran sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan.
2. Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian RP4.
3. Persentase Penyelesaian Penertiban Rumah Dinas.
4. Persentase completeness data master aset SIMAN.
5. Persentase jumlah tindak lanjut terhadap BMN Dihentikan Penggunaannya.
6. Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan.
7. Indeks Kepatuhan Pengisian RUP.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melengkapi data master aset SIMAN
2. Menyampaikan laporan wasdal tepat waktu
3. Berkoordinasi dengan Subbag Aset dan Pengadaan Kantor Pusat

4. Melengkapi data master aset SIMAN untuk rumah negara
5. Melakukan pendataan aset untuk dihapuskan

Analisis penyebab

Aplikasi PBJ Sebagian tidak terintegrasi sehingga dilakukan pencatatan berulang.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya :

1. **Anggaran** : Alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi IKU berikut adalah sebesar Rp48.000.000. Realisasi anggaran melebihi 99,89% dengan capaian output melebihi target yang ditentukan. Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

Rencana aksi masa depan

1. Melengkapi data master aset SIMAN
2. Melakukan pendataan aset untuk dihapuskan
3. Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN atas TKTM tahun 2022
4. Mengusulkan lelang BMN atas dasar penetapan RP4 revisi ke-2
5. Melakukan pengadaan secara *e-purchasing* melalui aplikasi BELA Pengadaan

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2022 realisasi anggaran belanja yang dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau sebesar 99,31% atau sebesar Rp 1.427.856.313,- dari anggaran yang tersedia dalam DIPA 2022 sebesar Rp1.437.722.000,-

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau mengelola beberapa output belanja yang terdiri dari:

1. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

Dana yang tersedia pada output ini diperguanakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp3.632.000,- atau sebesar 88.76% dari dana yang tersedia sejumlah Rp4.092.000,-

2. Komunikasi Publik

Dana yang tersedia pada output ini diperguanakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp8.795.200,- atau sebesar 97.92% dari dana yang tersedia sejumlah Rp9.000.000,-

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara

Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp6.636.765,- atau sebesar 95.03% dari dana yang tersedia sejumlah Rp6.984.000,-

4. Pengelolaan Keuangan Negara

Dana yang tersedia pada output ini diperguanakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu:

a. Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel;
b. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pencapaian sasaran pada output ini sebesar Rp9.712.000,- atau sebesar 97.51% dari dana yang tersedia sejumlah Rp9.960.000,-

5. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan

Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu:

a. Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel;
b. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan;
c. Pengelolaan kas yang optimal;
d. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output ini sebesar Rp32.439.000,- atau sebesar 96.77% dari dana yang tersedia sejumlah Rp33.520.000,-

6. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Dana yang tersedia pada output ini diperguanakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu:

a. Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi;
b. Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output ini sebesar Rp1.118.399.648,- atau sebesar 99.73% dari dana yang tersedia sejumlah Rp1.121.375.000,-

7. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Dana yang tersedia pada output ini diperguanakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu:

a. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal;
b. Sistem informasi dan teknologi yang andal.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output ini sebesar Rp68.992.000,- atau sebesar 99.75% dari dana yang tersedia sejumlah Rp69.167.000,-

8. Layanan Prasarana Internal

Dana yang tersedia pada output ini diperguanakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output ini sebesar Rp175.330.500,- atau sebesar 99.99% dari dana yang tersedia sejumlah Rp175.346.000,-

9. Layanan Manajemen Kinerja Internal

Dana yang tersedia pada output ini diperguanakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu:

a. Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi;
b. Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output ini sebesar Rp4.950.000,- atau sebesar 97.06% dari dana yang tersedia sejumlah Rp5.100.000,-

10. Layanan Manajemen SDM Internal

Dana yang tersedia pada output ini diperguanakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output ini sebesar Rp3.482.700,- atau sebesar 99.51% dari dana yang tersedia sejumlah Rp3.500.000,-

11. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Dana yang tersedia pada output ini dipergunakan untuk menunjang pencapaian sasaran yang telah ditentukan yaitu Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Realisasi belanja yang telah digunakan untuk pelaksanaan sasaran pada output ini sebesar Rp173.207.000,- atau sebesar 98.96% dari dana yang tersedia sejumlah Rp175.024.000,-

Adapun perbandingan pagu dan realisasi belanja unit (per jenis belanja) beberapa tahun terakhir dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

	2022			
Ket	**Pegawai**	**Barang**	**Modal**	**Total**
PAGU	167,924,000	1,200,631,000	69,167,000	1,437,722,0
REALISASI	166,277,000	1,192,587,313	68,992,000	1.427,856,6
PERSENTASE	99,02%	99,33%	99,75%	99.31%

SISA	1,647,000	8,043,687	175,000	9,865,384
2021				
Ket	Pegawai	Barang	Modal	Total
PAGU	172,296,000	1,033,561,000	48,300,000	1.254.157.000
REALISASI	171,466,000	1,029,947,287	48,214,894	1.249.628.181
PERSENTASE	99,52%	99,65%	99,82%	99.64%
SISA	830,000	3,613,713	85,106	4,528,819
2020				
Ket	Pegawai	Barang	Modal	Total
PAGU	179,040,000	1,138,702,000	575,775,000	1,893,517,000
REALISASI	178,163,000	1,103,016,672	575,775,000	1,856,954,672
PERSENTASE	99.51%	96.87%	100.00%	98.07%
SISA	877,000	35,685,328	-	36,562,328
2019				
Ket	Pegawai	Barang	Modal	Total
PAGU	188,162,000	1,338,382,000	7,270,000	1,533,814,000
REALISASI	187,988,000	1,334,556,147	7,270,000	1,529,814,147
PERSENTASE	99.91%	99.71%	100.00%	99.74%
SISA	174,000	3,825,853	-	3,999,853

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan)

Efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Sanggau untuk tahun 2022 sudah baik, terbukti dengan capaian efisiensi sebesar 20 dari batas nilai antara -20 sampai dengan 20 dan nilai efisiensi sebesar 100.

C. KINERJA LAINNYA

Selain 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang diterapkan, KPPN Sanggau juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2022 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja KPPN Sanggau, tetapi terkait dengan tugas dan fungsi KPPN Sanggau. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

a. LIVES (Layanan Informasi Virtual dan Edukasi Satker)

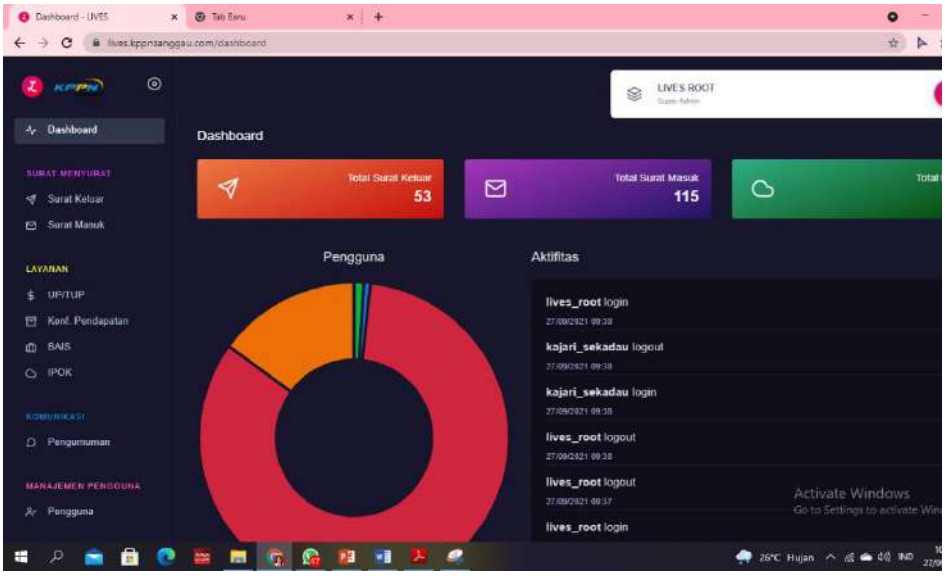

LIVES (Layanan Informasi Virtual dan Edukasi Satker) merupakan sebuah aplikasi persuratan yang disusun dalam rangka untuk menertibkan administrasi persuratan dan meningkatkan efisiensi/efektifitas dalam pengiriman Surat.

Dengan adanya LIVES, satker dan pemda tidak perlu mengirimkan hardcopy surat kepada KPPN dan hanya perlu mengunggah softcopy surat melalui LIVES serta langsung masuk ke aplikasi persuratan KPPN untuk mendapat disposisi Kepala KPPN. Dengan pengiriman softcopy surat tersebut, stakeholders akan lebih dimudahkan dan alur persuratan menjadi lebih tertib dan jelas. LIVES dapat diakses pada tautan https://lives.kppnsanggau.com

Menu yang terdapat pada LIVES antara lain sebagai berikut:

a. Dashboard, merupakan menu yang menyajikan informasi umum seperti grafik pengguna LIVES, aktivitas Log in/out pengguna LIVES, serta kontak dan media sosial KPPN Sanggau;
b. Surat Keluar, adalah menu yang digunakan KPPN untuk menyusun dan mengirimkan surat resmi kepada satker/pemda;
c. Surat Masuk, adalah kotak masuk surat-surat yang disampaikan satker/pemda kepada KPPN;
d. Layanan UP/TUP, merupakan menu yang digunakan KPPN untuk menyampaikan surat mengenai UP/TUP/GUP kepada satker;
e. Konfirmasi Pendapatan, merupakan menu yang menampilkan surat masuk dari satker mengenai permintaan konfirmasi pendapatan;
f. BAIS (Bimbingan dan Asistensi Intensif Satker), merupakan layanan bimbingan dan asistensi intensif atas permintaan satker terkait permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan APBN yang dilaksanakan baik secara tatap muka maupun online meeting secara one on one meeting;
g. IPOK (Informasi Perbendaharaan Online KPPN Sanggau), merupakan suatu sistem database yang memuat peraturan, informasi, dan teknis aplikasi dalam format audio dan video proses bisnis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan APBN;

h. Pengumuman, merupakan layanan yang disajikan KPPN melalui LIVES untuk menyebarkan informasi terbaru seputar perbendaharaan dan KPPN Sanggau kepada satker/pemda.

i. Pengguna, merupakan menu yang digunakan KPPN Sanggau selaku admin untuk dapat menambahkan pengguna LIVES;

j. Profil Saya, digunakan untuk melakukan setting akun pengguna LIVES seperti foto profil dan ubah password.

b. SKPP Online

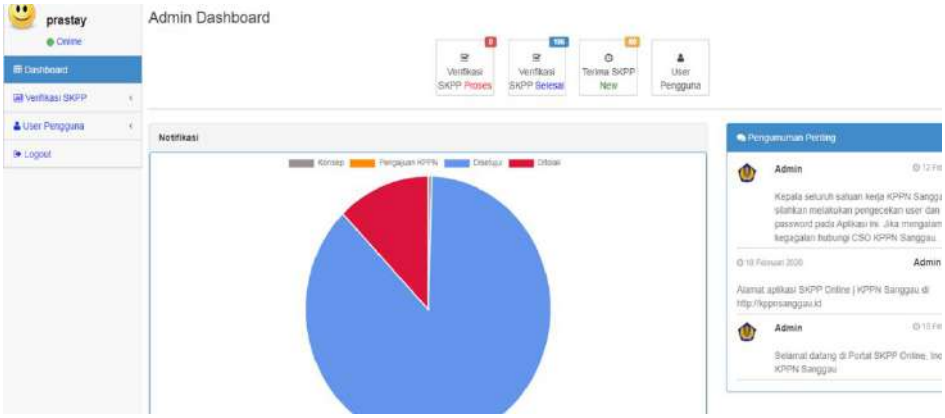

Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) merupakan salah satu produk layanan unggulan KPPN. Berkas SKPP disampaikan oleh satker kementerian/Lembaga kepada KPPN untuk disahkan sebagai kebutuhan administrasi terkait perpindahan atau mutasi dan pensiun pegawai.

Setiap tahun berkas SKPP yang disampaikan ke KPPN Sanggau mencapai ratusan berkas. Dengan banyaknya angka tersebut kemudian muncul keluhan dari satker terkait proses pengesahan SKPP yang telah disampaikan ke KPPN tidak dapat dimonitor dan berkas SKPP yang telah disahkan terlambat diterima oleh satker yang bersangkutan. Dari berbagai keluhan tersebut KPPN Sanggau berinisiatif menggagas sebuah inovasi terkait tata cara penyampaian SKPP dengan menggunakan teknologi internet yang progresnya bisa dimonitor di berbagai waktu dan tempat yaitu melalui SKPP Online pada tautan http://skpponlinekalbar.id/

Dengan SKPP Online, satker yang akan mengajukan pengesahan SKPP ke KPPN cukup mengunggah berkas SKPP dengan format pdf. dengan menggunakan user dan password yang telah dibagikan. Selanjutnya satker dapat memonitor progres pengajuan berkas SKPP melalui dashboard SKPP Online tersebut.

Pengesahan SKPP merupakan salah satu layanan unggulan KPPN yang menuntut kecepatan dalam penyelesaiannya. Sebelum adanya inovasi SKPP Online, pengiriman berkas SKPP yang telah disahkan oleh KPPN terkendala oleh lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga pegawai yang pindah atau mutasi mengalami keterlambatan pembayaran gaji pada bulan selanjutnya. Selain itu proses pengesahan SKPP juga tidak dapat dimonitor oleh satker. Sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang mengharapkan adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap layanan kepada stakeholders, maka dibuatlah inovasi SKPP Online dengan harapan berbagai keluhan

dan permasalahan terkait pengesahan SKPP menjadi nihil. SKPP yang telah disahkan dapat diterima oleh satker dengan tepat waktu dan satker dapat memonitor proses pengesahan SKPP yang diajukan secara real time.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa jangka waktu penyelesaian pengesahan SKPP adalah 2 (dua) hari kerja setelah pengajuan SKPP diterima secara lengkap. Dengan adanya ketentuan tersebut, satker sering menyampaikan keluhan yaitu satker tidak dapat memonitor progress penyelesaian SKPP yang telah mereka ajukan padahal waktu yang tersedia sangat terbatas. Proses pengesahan SKPP juga terkendala dengan lamanya waktu pengiriman berkas baik dari satker ke KPPN maupun sebaliknya. Berbagai keluhan terkait layanan pengesahan SKPP ini mengharapkan proses yang dapat berjalan dengan cepat atau kurang dari 2 (dua) hari kerja dan dapat dimonitor secara real time sehingga tidak menyalahi aturan yang telah ada dan ditetapkan.

Inovasi SKPP Online sangat berdampak positif terhadap layanan KPPN kepada satker dalam hal permohonan pengesahan SKPP pegawai pindah atau mutasi dan pensiun. Dampak positif yang dihasilkan oleh inovasi SKPP Online antara lain sebagai berikut:

1. Kecepatan, yaitu dengan adanya inovasi SKPP Online pengajuan berkas permohonan pengesahan SKPP pegawai pindah atau mutasi dan pensiun menjadi lebih cepat diproses oleh KPPN tanpa harus datang ke KPPN atau melalui jasa pengiriman;
2. Kemudahan, yaitu penggunaan SKPP Online yang sangat user friendly karena satker yang mengajukan berkas permohonan pengesahan SKPP hanya perlu mengunggah dokumen dengan format pdf. saja pada laman SKPP Online;
3. Transparansi, yaitu pada dashboard laman SKPP Online terdapat tombol “Monitoring SKPP” yang menampilkan progres pengesahan berkas SKPP yang telah diajukan oleh satker secara real time;
4. Akuntabilitas, yaitu dengan adanya SKPP Online proses pengesahan SKPP tidak akan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 2 (dua) hari kerja;

Inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan pada sistem pengesahan SKPP yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara oleh Kantor Pusat. Selaras dengan perkembangan era revolusi industry 4.0 yaitu proses layanan secara manual sudah seharusnya bisa diakses secara daring.

Inovasi SKPP Online memiliki beberapa sisi inovatif yaitu SKPP Online memanfaatkan jaringan internet sehingga dapat diakses oleh satker dimana saja dan kapan saja. Dengan memanfaatkan jaringan internet satker juga dapat lebih mengefisienkan anggaran jasa pengiriman dan perjalanan dinas untuk menyampaikan berkas permohonan pengesahan SKPP. Fitur “Upload Berkas SKPP” pada inovasi SKPP Online juga mendukung program Go Green karena hanya dengan mengunggah dokumen format pdf. berkas permohonan pengesahan SKPP dapat segera diproses oleh KPPN.

SKPP Online merupakan modifikasi sebuah proses pengajuan pengesahan SKPP yang sebelumnya diajukan secara langsung ke KPPN atau melalui jasa pengiriman menjadi

diajukan secara digital dengan sistem basis data terpusat. Hal ini juga sejalan dengan apilkasi Gaji Terpusat yang dikembangkan oleh Direktorat SITP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan adanya SKPP Online setiap satker juga dapat memonitor progres dari berkas permohonan pengesahan SKPP yang telah diunggah pada laman tersebut. Inovasi ini sangat inovatif karena dapat memangkas waktu proses pengesahan SKPP menjadi lebih pendek dan menghilangkan diskriminasi serta gratifikasi dalam sistem pengajuan permohonan pengesahan SKPP.

Inovasi SKPP Online memiliki potensi dan terbukti telah diterapkan dan diadaptasi oleh KPPN lain lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

Pada era revolusi industri 4.0, perbaikan kualitas jaringan di seluruh wilayah Indonesia mendorong perubahan pada sistem pelayanan yang semula manual menjadi digital dengan basis data terpusat. Dimulai dengan pengembangan aplikasi oleh Direktorat SITP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu Aplikasi Gaji Terpusat dengan mengubah sistem basis data Aplikasi GPP yang semula berada pada masing-masing KPPN menjadi basis data terpusat di Pusintek Kementerian Keuangan. Hal tersebut mendorong inovasi SKPP Online dapat terus berkembang. Beberapa fitur seperti “Kirim SKPP ke KPPN Lain” dapat aktif bila KPPN lain juga menggunakan inovasi SKPP Online. Selain itu produk layanan terkait pengesahan SKPP juga akan masih dibutuhkan karena proses penonaktifan supplier pegawai pindah atau mutasi perlu mendapat persetujuan dari KPPN dan pengesahan berkas SKPP pegawai pensiun juga masih dibutuhkan oleh Taspen/Asabri.

Pada era revolusi industri 4.0 yang baru saja dimulai dengan ditandai oleh tren otomasi dan pertukaran data secara digital dalam memberikan layanan kepada stakeholders, inovasi SKPP Online sangat efektif untuk diadaptasi oleh KPPN di seluruh Indonesia dengan kesamaan produk layanan yang dimiliki. Dengan dukungan kualitas jaringan internet yang jauh lebih baik dan stabil pada hamper seluruh kota di Indonesia dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Inovasi SKPP Online sangat berpotensi untuk diterapkan atau direplikasi. Dengan sistem single database, pengesahan SKPP juga akan semakin mudah.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa era digital dan zaman revolusi industri 4.0 merupakan sebuah fase yang tidak dapat terelakkan. Mau tidak mau sistem layanan seperti pengesahan SKPP harus mengalami pengembangan lebih lanjut berupa digitalisasi. Simplifikasi proses pengajuan permohonan pengesahan SKPP oleh satker kepada KPPN sangat penting dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran instansi. Sinergi yang baik antara KPPN dengan satker dapat mendukung KPPN dalam upaya peningkatan layanan terbaik (continuous improvement). Selanjutnya peningkatan inovasi SKPP Online akan terus dilakukan dengan memperhatikan setiap unsur mulai dari peningkatan kapasitas SDM terkait manajemen TIK, perbaikan sarana TIK sebagai tool yang sangat penting untuk pengembangan inovasi, hingga alokasi anggaran untuk mendukung perbaikan sarana TIK dan unsur-unsur pendukung lainnya.

c. 167 Jekpod (Jumat Edukasi Podcast)

Jumat Edukasi Podcast atau JEKPOD merupakan inovasi terbaruKPPN Sanggau dalam memberikan informasi dengan penyajian yang lebih menarik. Dalam jekpod ini tidak hanya membahas terkait tugas dan fungsi KPPN tapi bisa juga menjadi sarana untuk promosi umkm atau info info lain yang bisa membantu dan menambah wawasan masyarakat ketika menonton jekpod.

Inovasi ini merupakan inovasi baru yang ada di KPPN Sanggau dan telah dikeluarkan episode 1 jekpod dan membahas terkait Jaminan Pembayaran Akhir Tahun. Video tersebut dikeluarkan pada akhir tahun 2022.

2. Penghargaan-penghargaan

a. Peringkat Pertama Penilaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Daerah (BUN-D) KPPN Tipe A2 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR: 03/PNL.LKBUND 20/2021

diberikan kepada:

KPPN SANGGAU

sebagai peraih

PERINGKAT PERTAMA

Penilaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Daerah (BUN-D)
KPPN Tipe A2 lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.

Pontianak, November 2021
Kepala Kantor Wilayah

IMIK EKO PUTRO

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabiltas pengelolaan keuangan negara. Adapun KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah menyusun Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2021, Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah Tahun 2020 KPPN Sanggau menorehkan prestasi sebagai peringkat I lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang membuktikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada wilayah kerja KPPN Sanggau.

b. Peringkat Pertama Penilaian IKPA KPPN Selaku BUN/Pembina Satker Kategori KPPN Tipe A2 Triwulan III Tahun 2021

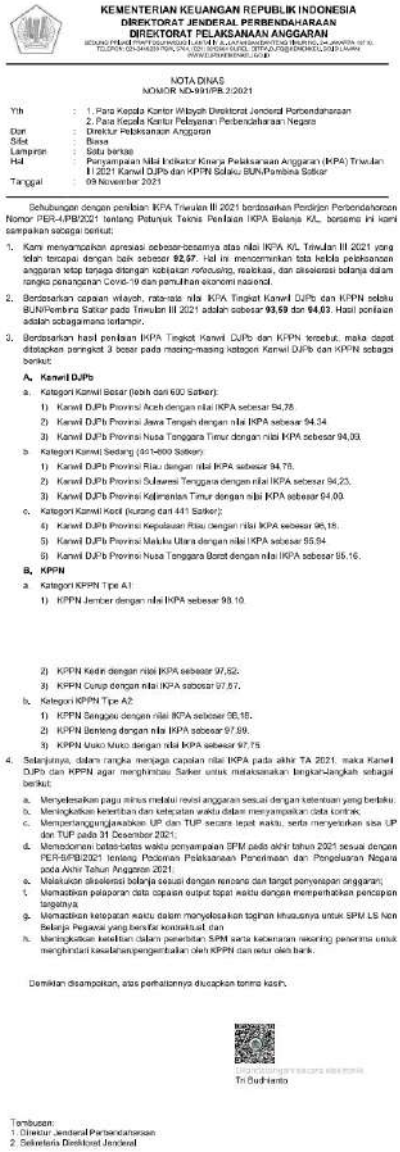

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

NOTA DINAS
NOMOR ND-991/PB.2/2021

Yth : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Dari : Direktur Pelaksanaan Anggaran
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III 2021 Kanwil DJPb dan KPPN Selaku BUN/Pembina Satker
Tanggal : 09 November 2021

Sehubungan dengan penilaian IKPA Triwulan III 2021 berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas nilai IKPA K/L Triwulan III 2021 yang telah tercapai dengan baik sebesar **82,67**. Hal ini mencerminkan tata kelola pelaksanaan anggaran tetap tangguh ditengah kebijakan *refocusing*, realokasi, dan akselerasi belanja dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
2. Berdasarkan capaian wilayah, rata-rata nilai IKPA Tingkat Kanwil DJPb dan KPPN selaku BUN/Pembina Satker pada Triwulan III 2021 adalah sebesar **93,59** dan **94,03**. Hasil penilaian adalah sebagaimana terlampir.
3. Berdasarkan hasil penilaian IKPA Tingkat Kanwil DJPb dan KPPN tersebut, maka dapat ditetapkan peringkat 3 besar pada masing-masing kategori Kanwil DJPb dan KPPN sebagai berikut:
   A. Kanwil DJPb
   a. Kategori Kanwil Besar (lebih dari 600 Satker):
      1) Kanwil DJPb Provinsi Aceh dengan nilai IKPA sebesar 94,78.
      2) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dengan nilai IKPA sebesar 94,34.
      3) Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai IKPA sebesar 94,03.
   b. Kategori Kanwil Sedang (401-600 Satker):
      1) Kanwil DJPb Provinsi Riau dengan nilai IKPA sebesar 94,76.
      2) Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai IKPA sebesar 94,23.
      3) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai IKPA sebesar 94,00.
   c. Kategori Kanwil Kecil (kurang dari 401 Satker):
      4) Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai IKPA sebesar 96,16.
      5) Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara dengan nilai IKPA sebesar 95,94.
      6) Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai IKPA sebesar 95,16.
   B. KPPN
   a. Kategori KPPN Tipe A1:
      1) KPPN Jember dengan nilai IKPA sebesar 98,10.
      2) KPPN Kediri dengan nilai IKPA sebesar 97,52.
      3) KPPN Cirebon dengan nilai IKPA sebesar 97,57.
   b. Kategori KPPN Tipe A2:
      1) KPPN Sanggau dengan nilai IKPA sebesar 96,16.
      2) KPPN Bantaeng dengan nilai IKPA sebesar 97,89.
      3) KPPN Muko Muko dengan nilai IKPA sebesar 97,75.
4. Selanjutnya, dalam rangka menjaga capaian nilai IKPA pada akhir TA 2021, maka Kanwil DJPb dan KPPN agar menghimbau Satker untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Menyelesaikan pagu minus melalui revisi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. Meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam menyampaikan data kontrak;
   c. Mempertanggungjawabkan UP dan TUP secara tepat waktu, serta menyetorkan sisa UP dan TUP pada 31 Desember 2021;
   d. Menaatoni batas-batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun 2021 sesuai dengan PER-5/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021;
   e. Melakukan akselerasi belanja sesuai dengan rencana dan target penyerapan anggaran;
   f. Memastikan pelaporan data capaian output tepat waktu dengan memperhatikan penyapan tangannya;
   g. Memastikan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai yang bersifat kontraktual; dan
   h. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM serta ketersediaan rekening penerima untuk menghindari kesalahanpengembalian oleh KPPN dan retur oleh bank.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tri Budhianto

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi

Setiap aspek memiliki beberapa variabel yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan satker K/L.

Pada triwulan III tahun 2021 KPPN Sanggau menorehkan prestasi sebagai peringkat I penilaian IKPA KPPN selaku Kuasa BUN/Pembina Satker Kategori KPPN Tipe A2, yang membuktikan kualitas pelaksanaan anggaran pada wilayah kerja KPPN Sanggau.

c. **KPPN Terbaik Pertama atas Pengelolaan Kinerja Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: SERTF-16/WPB.17/2022

diberikan kepada:

KPPN SANGGAU

SEBAGAI

KPPN TERBAIK PERTAMA ATAS PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 2021
LINGKUP KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 27 Januari 2022
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

Imik Eko Putro

Pengelolaan Kinerja pada KPPN diihat dari *Strategy Focused Organization* yang dikirimkan setiap triwulan. KPPN Sanggau memperoleh prestasi sebagai KPPN terbaik pertama atas pengelolaan kinerja tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

d. **Peringkat Kedua Penilaian Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN Semester I Tahun 2021 dan Peringkat Pertama pada Semester II Tahun 2021**

Setiap Semester Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat melakukan pembinaan dan supervisi pelaksanaan tugas KPPN. KPPN Sanggau mendapat peringkat kedua pada Semester I Tahun 2021 dan peringkat pertama semester II tahun 2021.

e. **Peringkat Kedua Penilaian Identifikasi Awal Data keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (BUN-D) KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 kategori jumlah satker lebih dari 50.**

KPPN Sanggau berhasil menoreh prestasi peringkat kedua Penilaian Identifikasi Awal Data Keuangan tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (BUN-D) KPPN

lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 kategori jumlah satker lebih dari 50.

3. Capaian Lainnya

a. Implementasi Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 atau SMM ISO 9001:2015 adalah proses pengelolaan organisasi (perencanaan, penerapan, evaluasi, dan penyempurnaan) yang ditujukan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan harapan mitra kerja. Implementasi SMM ISO 9001:2015 menjadi langkah bagi KPPN Sanggau untuk memberikan jaminan mutu layanan berstandar internasional kepada mitra kerja yang sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. Tujuan dari implementasi SMM ISO 9001:2015 yaitu untuk memenuhi standar quality assurance Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, memberikan gambaran celah kesalahan yang ada dalam sistem dan proses bisnis KPPN, meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta meningkatkan kinerja dengan budaya mutu, disiplin, tertib administrasi, dan kerja secara sistematis.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Sanggau Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi KPPN Sanggau dalam tahun anggaran 2022 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPPN Sanggau merupakan salah satu unit eselon III di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara, KPPN Sanggau merupakan gabungan dari beberapa tugas dan fungsi yang beragam.

Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan KPPN Sanggau memiliki peran yang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara keseluruhan. KPPN Sanggau memiliki peran strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mengingat bahwa dari keseluruhan siklus APBN, KPPN Sanggau memegang peran yang dinamis berkaitan dengan penyiapan/penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem perbendaharaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pencapaian kinerja KPPN Sanggau tahun 2022 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana seluruh IKU telah mencapai target yang ditentukan. Kinerja KPPN Sanggau tahun 2022 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain:

a. Nilai Kinerja Organisasi yang diukur berdasarkan pengelolaan klinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) mencapai 108,93 dari total 20 IKU;

b. Di samping itu, terdapat beberapa penghargaan yang diraih KPPN Sanggau pada tahun 2022.

Meksipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, KPPN Sanggau secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan untuk seluruh jajaran KPPN Sanggau dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.